



Rancangan Induk Penataan
Sumber Daya Alam dan Buatan
Komponen Pendukung Pertahanan Negara
2015 - 2039





Rancangan Indikator Pendidikan Sumber Daya Alam dan Budaya
Komponen Pendidikan Diri dalam Negara 2015 - 2039

2016



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

**RANCANGAN INDUK
PENATAAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN
KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
2015 – 2039**

Jakarta, 17 Desember 2016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur dan atas limpahan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, "Naskah Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039" telah dapat diselesaikan penyusunannya. Naskah Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039 ini masih bersifat sementara, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam perturan perundangan. Dan, selanjutnya akan menjadi acuan bagi Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan serta pemerintah daerah dalam menata sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis komponen pendukung pertahanan negara yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama (TNI) dan komponen cadangan..

Penyusunan naskah Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039 ini, dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya hasil penataan sumber daya alam dan buatan yang akan ditransformasikan menjadi logistik wilayah dan cadangan materiil strategis komponen pendukung pertahanan negara. Hasil penataan yang belum maksimal tersebut dikarenakan belum adanya koordinasi dan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah selaku pengembang fungsi pengelelola sumber daya alam dan buatan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan buatan, untuk kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan.

Atas dasar pertimbangan hal tersebut di atas, maka disusunlah naskah Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039 ini, sebagai dokumen perencanaan penataan jangka panjang untuk masa 25 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2039.

Semoga Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039 ini dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menata sumber daya alam dan buatan komponen pendukung pertahanan negara, dalam rangka mendukung pembangunan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Jakarta, Desember 2016



DAFTAR ISI

HAL

PENGANTAR	i
BAB I	PENDAHULUAN	1-8
1.	Latar Belakang	1
2.	Landasan	2
3.	Maksud dan Tujuan	3
4.	Prinsip-prinsip	4
5.	Tata Urut	5
6.	Pengertian	5
BAB II	KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN, SERTA ISU STRATEGIS	9-22
7.	Kondisi Umum	9
8.	Potensi dan Permasalahan	10
9.	Isu-isu Strategis	22
BAB III	VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN	23-33
10.	Visi	23
11.	Misi	23
12.	Arah Kebijakan	26
BAB IV	TAHAPAN PENATAAN 2015-2039 DAN KERANGKA KERJA	34-42
13.	Sasaran Lima Tahun Pertama 2015-2019	34
14.	Sasaran Lima Tahun Kedua 2020-2024	35
15.	Sasaran Lima Tahun Ketiga 2025-2029	37
16.	Sasaran Lima Tahun Keempat 2030-2034	38
17.	Sasaran Lima Tahun Kelima 2035-2039	39
18.	Kerangka Kerja Pelaksanaan	40

BAB V	STRATEGI PELAKSANAAN PENATAAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN GUNA MEWUJUDKAN LOGISTIK WILAYAH DAN CADANGAN MATERIIL STRATEGIS	43-53
19. Strategi Pelaksanaan	43	
20. Prosedur Pembinaan	46	
21. Pengelolaan Penerapan Strategi Penataan Logistik Wilayah dan Cadangan Materiil Strategis	48	
22. Strategi Implementasi Penataan dan Pembinaan	49	
BAB VI	ROADMAP LIMA TAHUN PERTAMA 2015-2019	54-68
23. Sumber Daya Alam Menjadi Basis dalam Pembangunan	54	
24. Alur Perumusan Arah Kebijakan Penataan Logistik Wilayah dan Cadangan Materiil Strategis 2015-2019	62	
25. Sasaran Pokok 2015-2019	62	
BAB VII	PENUTUP	69-70
26. Kandungan Rancangan Induk	69	
27. Rancangan Induk sebagai Pedoman	69	
28. Penataan Logistik	69	
29. Keberhasilan	69	
- Lampiran 1: Tabel Matriks Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan Dan Cadangan Materiil Strategis Komponen Pendukung Pertahanan Negara	71-79	
- Lampiran 2: Matrik Target Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015 -2019	80-88	
- Lampiran 3: - Kawasan Pertahanan Nusantara	89	
- Kompartemen Starategi Wilayah Darat	90	
- Rencana Penggelaran Pangkalan dan Kekuatan Marinir	91	

- Palagan Pelibatan Kekuatan Udara	92
- Rencana Pelibatan (Darat – Laut – Udara)	93
- Peta SDA, Obyek fital, ALKI, Daerah rawan	94
- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015....	95
- Peta Ketersediaan Pangan	96
- Akses Listrik	97
- Akses Jalan	98
- Potensi Sumberdaya Pangan (SDP) Nasional.....	99
- Sumberdaya Pangan (Sumber Karbohidrat) Indonesia	100
- Sumberdaya Peternakan Indonesia	101
- Komoditas Perkebunan Indonesia	102
- Cadangan Serta Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia	103
- Regionalisasi Fasilitas Penyimpanan BBM	104
- Fasilitas Penyimpanan Depo LPG (Inland)	105
- Sumberdaya dan Cadangan Mineral	106-107
- Kondisi Sumberdaya dan Cadangan Mineral Logam Indonesia	108
- Kondisi Sumberdaya dan Cadangan Mineral Strategis Indonesia	109
- Sumberdaya dan cadangan Batubara	110
- Kondisi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia	111

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- b. Sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
- c. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- d. Dalam Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta, wilayah negara terbagi menjadi beberapa wilayah pertahanan negara, baik wilayah pertahanan darat, wilayah pertahanan laut dan wilayah pertahanan udara. Untuk wilayah pertahanan darat

dikenal istilah daerah kompartemen strategis, merupakan wilayah pertahanan darat yang mampu mengadakan perlawanan secara mandiri. Mandiri dalam arti kekuatan bersenjatanya maupun dukungan logistik dan cadangan materiil strategisnya. Sumber utama logistik wilayah adalah sumber daya alam dan buatan, baik yang masih bersifat potensi maupun yang siap pakai atau siap untuk digunakan. Sumber daya alam dan buatan merupakan unsur komponen pendukung yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Guna mempersiapkan sumber daya alam dan buatan sebagai komponen pendukung memerlukan penataan dan pembinaan, sehingga dapat dimanfaatkan bagi untuk kepentingan kesejahteraan dimasa damai dan untuk kepentingan pertahanan dimasa perang. Penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan guna penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.

- e. Mengingat penyiapan penataan sumber daya alam dan buatan untuk pertahanan negara memerlukan waktu jangka panjang dan melibatkan lintas sektoral, maka perlu disusun Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Komponen Pendukung Pertahanan Negara. Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Komponen Pendukung Pertahanan Negara adalah dokumen perencanaan penataan jangka panjang untuk masa 25 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2039.

2. Landasan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
- j. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- k. Direktorat Komponen Pendukung Ditjen Pothan Kemhan Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Tahun 2015.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud. Rancangan Induk penataan sumber daya alam dan buatan komponen pendukung pertahanan negara dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penataan jangka panjang untuk masa 25 tahun ke depan yang dimulai dari Tahun 2015 hingga Tahun 2039.
- b. Tujuan. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam penataan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang ditetapkan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku penataan dapat berjalan secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola pikir, pola sikap dan pola tindak.

4. Prinsip-Prinsip. Agar pelaksanaan penataan sumber daya alam dan buatan yang akan dijadikan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis berjalan sesuai dengan yang direncakan, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Bersifat Semesta

Penataan sumber daya alam dan buatan dilaksanakan secara total, terpadu dan berlanjut guna memenuhi kebutuhan penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dalam mendukung pembangunan sistem pertahanan negara.

b. Bersinergi

Pelaksanaan penataan merupakan penyatuan langkah yang bersatu padu dan bersinergi antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga diluar bidang pertahanan dan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya, yang berkontribusi pada upaya penataan sumber daya alam dan buatan untuk penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis sampai pada kondisi yang diharapkan guna meningkatkan upaya pertahanan negara.

c. Berkelanjutan

Pelaksanaan penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis diselenggarakan secara berkelanjutan atau berkesinambungan, sebagai suatu proses yang tidak pernah berakhir sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis.

d. Bertahap

Penataan sumber daya alam dan buatan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari lima pulau besar hingga ke rangkaian pulau-pulau kecil sehingga mencakup seluruh wilayah negara.

e. Terukur

Pelaksanaan Penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis berjalan satu tahap menuju ke tahap berikutnya, didasarkan pada hasil penilaian tertentu yang dirumuskan berdasarkan indikator kinerja yang relevan dan tepat. Pengembangan indikator kinerja mempertimbangkan kriteria :

- 1) Spesifik, terdefinisikan dengan jelas dan fokus sehingga tidak menimbulkan multitafsir;

- 2) Terukur, dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas dan kualitas);
- 3) Dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan metode yang sesuai, serta berada di dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- 4) Berorientasi pada hasil, terkait secara logis dengan program atau kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- 5) Terjadwal, memperhitungkan rentang waktu pencapaian.

f. Teruji

Pelaksanaan penataan di setiap tahapan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan parameter yang ada, melalui rangkaian revisi penyempurnaan dari tahapan sebelumnya. Demikian seterusnya sehingga terjadi proses penyempurnaan di setiap tahapan.

5. Tata Urut

Rancangan Induk penataan sumber daya alam dan buatan komponen pendukung pertahanan negara, disusun dalam tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan, Serta Isu Strategis
- c. Bab III Visi, Misi dan Arah Kebijakan
- d. Bab IV Tahapan dan Kerangka Kerja Pelaksanaan
- e. Bab V Strategi Pelaksanaan
- f. Bab VI *Roadmap* Lima Tahun Pertama
- g. Bab VII Penutup

6. Pengertian

- a. Penataan sumber daya alam dan buatan adalah proses kegiatan yang dimulai dari penyiapan dan penetapan

sumber daya alam dan buatan bagi kepentingan pertahanan negara. Proses penyiapan dimulai dari pendataan, pemilihan, pemilihan. Sedangkan proses penetapan dimulai dari verifikasi dan sertifikasi.

- b. Pembinaan sumber daya alam dan buatan adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian sumber daya alam dan buatan yang dipersiapkan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis sebagai bagian dari komponen pendukung pertahanan negara secara berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Sumber daya alam adalah potensi yang terkadung di dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan.
- d. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
- e. Logistik adalah bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan pengantaran sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal sampai dengan titik tujuan
- f. Logistik wilayah adalah logistik yang disiapkan di daerah tertentu, bertumpu pada sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut dalam rangka mendukung operasi militer yang berbentuk operasi perlakuan wilayah.
- g. Cadangan materiil strategis adalah bahan dan atau hasil pertambangan dan alat peralatan industri untuk mendukung pertahanan negara.
- h. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan
- i. Prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
- j. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

- k. Wilayah pertahanan negara yang selanjutnya disebut wilayah pertahanan adalah suatu wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
- l. Wilayah Pertahanan statis adalah wilayah yang ditetapkan sebagai pangkalan TNI, daerah latihan militer, daerah uji coba dan peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang-barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, kepentingan pertahanan udara, dan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
- m. Wilayah Pertahanan dinamis adalah wilayah pertahanan yang sifatnya tidak tetap/permanen pada kondisi damai, mencakup daerah latihan militer, medan pertahanan penyangga, dan medan pertahanan utama yang merupakan mandala perang meliputi: daerah perlawanan, daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan.
- n. Kompartemen strategis merupakan komando kewilayahan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
- 1) Mampu memberikan perlawanan secara teratur dan terus menerus secara berdiri sendiri dengan memanfaatkan ruang dan waktu secara kenyal.
 - 2) Mempu menyelenggarakan pertahanan dalam bentuk operasi angkatan tunggal maupun operasi secara gabungan dan semesta di pulau-pulau besar dan rangkaian kepulauan kecil dalam daerah tanggungjawabnya.
 - 3) Terdiri dari beberapa subkompartemen strategis yang berperan sebagai daerah depan, daerah komunikasi dan daerah belakang bagi kompartemen strategis yang bersangkutan.
- o. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang berperan dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
- p. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilsasi guna

memperbesar dan memperkuat kemampuan komponen utama.

- q. Komponen pendukung sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- r. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- s. Sistem pertahanan adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- t. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman
- u. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
- v. Cadangan pangan pemerintah provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
- w. Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
- x. Cadangan pangan pemerintah desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
- y. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga



Salam dari Desa....

BAB 2

KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN, SERTA ISU STRATEGIS

7. Kondisi Umum

- a. Penataan sumber daya alam dan buatan sebagai komponen pendukung pertahanan negara dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, masukan dari pemangku kepentingan, tantangan pembangunan, serta kondisi bangsa.
- b. Sumber daya alam dan buatan dalam konteks pertahanan negara dipersiapkan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis. Sumber daya alam dan buatan merupakan komoditas yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional, diantaranya makanan, ternak hidup dan daging, bahan bakar, logam dan produk perkebunan. Komoditas merupakan penggerak utama logistik nasional. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan komoditas strategis maupun komoditas ekspor, seharusnya akan menjadikan Indonesia sebagai "*supply side*" yang dapat memasok dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan hasil industri olahannya, sekaligus menjadi pasar yang besar atau *demand side*.
- c. Faktanya kondisi logistik nasional di Indonesia dapat dieksplorasi menjadi beberapa poin penting, diantaranya:
 - 1) Komoditas penggerak utama (*key commodity factor*) belum terkoordinasi secara efektif, belum adanya fokus komoditas yang ditetapkan sebagai komitmen nasional dan belum optimalnya volume perdagangan ekspor dan impor;
 - 2) Infrastruktur transportasi nasional belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang antara

- lain karena belum adanya pelabuhan hub, intermodal transportasi belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta dan belum terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan, pergudangan, transportasi dan wilayah *hinterland*,
- 3) Pelaku dan penyedia jasa logistik masih berdaya saing rendah karena terbatasnya jaringan bisnis pelaku dan penyedia jasa logistik lokal sehingga pelaku multinasional lebih dominan dan terbatasnya kualitas dan kemampuan Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Nasional;
 - 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan jaringan yang handal, masih terbatasnya jangkauan jaringan pelayanan nongseluler, dan masih terbiasanya menggunakan sistem manual (*paper based system*) dalam transaksi logistik;
 - 5) SDM logistik masih memiliki kompetensi rendah yang disertai oleh belum memadainya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang Logistik;
 - 6) Regulasi dan kebijakan masih bersifat parsial dan sektoral, yang disertai oleh masih rendahnya penegakan hukum, belum efektifnya Koordinasi Lintas Sektoral, dan belum adanya lembaga yang menjadi integrator kegiatan logistik Nasional.

8. Potensi dan Permasalahan. Ditinjau dari aspek pertahanan negara, potensi dan permasalahan penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan akan menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat dijadikan input dalam menentukan arah dan strategi kebijakan bagi Kementerian Pertahanan.

a. Logistik Wilayah

1) Potensi

- a) Pengertian. Istilah logistik mencakup banyak aspek dan kegiatan yang sangat luas, mulai dari: merencanakan apa-apa yang dibutuhkannya, bagaimana cara memperolehnya, menyimpannya, memeliharanya atau mengawetkannya,

mendistribusikannya kemudian membuangnya bila memang rusak atau tidak diperlukan lagi.

- b) Sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah untuk kepentingan pertahanan dalam penyelenggaraannya memerlukan penetapan ukuran sebagai dasar penilaian, antara lain :
- (1) Perlu adanya optimalisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan serta pendayagunaan sumber daya alam untuk logistik wilayah dan cadangan materiil strategis antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - (2) Sumber daya alam dan buatan yang merupakan hasil produksi pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta yang memiliki nilai ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat di masa damai dan pemanfaatannya pada masa perang, meliputi :
 - (a) produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan
 - (b) produksi hasil industri pangan, bahan kain, pakaian, elektronika, kimia, alat peralatan berat dan ringan, dan lain sebagainya.
- c) Hasil pertanian berupa bahan makanan diharapkan dapat dikonsumsi sepanjang tahun, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- (1) berapa produksi pangan dimasa damai, baik jumlah dan jenisnya harus dapat diketahui secara pasti.
 - (2) berapa banyak stok nasional yang tersimpan sebagai cadangan diseluruh wilayah Indonesia.

- (3) usaha peningkatan bahan pangan tidak hanya untuk makanan pokok beras, jagung, dan sagu akan tetapi dapat berbentuk ketela, ubi jalar, kacang-kacangan dan lain-lain.
- d) Tenaga manusia sebagai faktor produksi dikembangkan dan dipersiapkan melalui pengikutsertaan rakyat dalam mengelolaan sumber daya alam dan buatan guna meningkatkan perekonomian nasional termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan.
- e) Memiliki jaringan jalan pendistribusian di setiap wilayah, mulai dari tempat produksi sampai dengan tempat penggudangan/penyimpanan dan titik distribusi.
- f) Memiliki instalasi logistik dan badan-badan pengelola logistik yang tergelar diseluruh wilayah dan disesuaikan dengan rencana pertahanan ataupun rencana kontijensi masing-masing wilayah.
- 2) **Kemampuan.** Kemampuan logistik wilayah meliputi :
- a) **Dukungan.** Logistik wilayah harus dapat mendukung kebutuhan pokok untuk kepentingan pertahanan negara pada saat perang, sesuai kebutuhan, yaitu bekal kelas I s.d Kelas V yang ditentukan.
- 1) Bahan makanan yang merupakan hasil dari pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perindustrian sebagai objek logistik wilayah untuk memenuhi kebutuhan **bekal kelas I**.
- 2) Hasil-hasil industri materiil berupa perlengkapan perorangan dan perlengkapan satuan sebagai objek logistik wilayah untuk memenuhi kebutuhan **bekal kelas II**.

- 3) Hasil industri pengolahan minyak dan gas bumi berupa minyak tanah, bensin, solar, *Liquid Petroleum Gas (LPG)* dan pelumas sebagai objek logistik wilayah untuk memenuhi kebutuhan **bekal kelas III**.
- 4) Hasil-hasil industri materiil berupa senapan angin, tombak, *toolkit/peralatan* ringan untuk pertukangan dan per Bengkelan, suku cadang kendaraan, batu baterai dan lain-lain sebagai objek logistik wilayah untuk memenuhi kebutuhan **bekal kelas IV**.
- 5) Hasil-hasil industri materiil berupa amunisi/bahan peledak sebagai objek logistik wilayah untuk memenuhi kebutuhan **bekal kelas V**.

b) **Pendayagunaan.**

- (1) Bahan industri yang bersifat strategis untuk kepentingan perang, seperti bahan pangan, bahan tambang, mineral, kapas, karet, kulit, kelapa sawit dan lain-lain dapat dikendalikan, dimanfaatkan dan ditingkatkan kemampuannya.
 - (2) Energi yang bersumber dari wilayah setempat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perang, seperti: tenaga air, matahari, panas bumi, energi listrik dan lain sebagainya.
- c) Semua bahan logistik yang dihasilkan di daerah, disimpan di gudang-gudang penyimpanan yang telah digelar di daerah serta dapat didistribusikan sesuai dengan perkiraan ancaman, yang didukung alat transportasi guna mendistribusikan bekal ulang secara cepat dan tepat waktu, serta tepat sasaran.

- d) Setiap wilayah harus mampu menyediakan bahan logistik yang berasal dari wilayah itu sendiri sesuai perkiraan yang dibutuhkan untuk masyarakat di masa damai.
- e) Sumber logistik wilayah terdiri dari : produk hulu maupun hilir:
 - (1) Tanaman pangan, meliputi : padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau, kayu.
 - (2) Tanaman hortikultura, meliputi : kentang, pisang, jeruk, dan jahe.
 - (3) Perkebunan, meliputi : kopi, teh, kelapa, kelapa sawit, kakao, tembakau, karet, cengkeh, tebu, kapas, dan lada.
 - (4) Peternakan, meliputi: sapi, kerbau, domba/ kambing, ayam
 - (5) Perikanan, meliputi :
 - (a) Perikanan budidaya mencakup: ikan kolam, ikan sawah, ikan keramba, ikan laut, perikanan jaring dan ikan tambak.
 - (b) Perikanan tangkap mencakup: perikanan laut dan perikanan umum.

2) **Permasalahan Logistik Wilayah**

- a) Belum optimal dan sinerginya pelaksanaan kebijakan serta pemanfaatan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
- b) Belum optimalnya penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah, yang bersumber dari hasil produksi pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta.

- c) Belum ada alokasi khusus dari pemerintah daerah untuk mendukung logistik TNI dalam rangka menghadapi perang/operasi militer.
- d) Tenaga manusia sebagai faktor produksi dikembangkan dengan mengadakan penyiapan terhadap keikutsertaan rakyat dalam mengelola sumber daya dan kekayaan alam guna meningkatkan perekonomian nasional termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan. Terkait dengan penyiapan logistik wilayah untuk pertahanan negara belum melibatkan tenaga manusia secara maksimal dan terencana.
- e) Jaringan jalan pendistribusian di wilayah mulai dari tempat produksi sampai dengan tempat penggudangan atau penyimpanan dan titik distribusi belum direncanakan secara maksimal.
- f) Instalasi logistik dan badan-badan pengelola logistik yang tergelar diseluruh wilayah belum disesuaikan dengan rencana pertahanan ataupun rencana kontijensi masing-masing wilayah.

b. Cadangan Materiil Startegis

1) Potensi

- a) Materiil dikatakan bernilai strategis karena fungsi dari materiil tersebut memenuhi kebutuhan negara, baik untuk kesejahteraan (memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi) maupun pertahanan negara. Indikasi strategis, akan semakin nampak apabila terjadi kelangkaan terhadap materiil tersebut maka akan mempengaruhi stabilitas nasional serta berpengaruh terhadap kebijakan operasional pertahanan Negara. Contoh: bahan bakar minyak, bahan mineral strategis, bahan tambang, dan lain-lain.
- b) Sedangkan cadangan materiil strategis terkandung makna bahwa materiil tersebut

harus ada secara nyata dengan jumlah sesuai dengan ketentuan. Disamping itu materiil tersebut harus tersedia terkait dengan kesiapan operasional, dengan demikian materiil tersebut harus disiapkan pada suatu tempat tertentu yang suatu waktu siap digunakan. Kriteria cadangan memiliki kriteria, sebagai berikut :

- (1) memiliki kemampuan dukungan efektif sesuai dengan kondisi geografis Indonesia
 - (2) mampu memberikan dukungan dalam jumlah yang diperlukan oleh komponen utama (TNI) dan komponen cadangan pada operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
 - (3) kriteria minimal, cadangan materiil strategis harus tersedia di lima pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil.
 - (4) kriteria ideal, cadangan materiil strategis harus dipersiapkan di setiap wilayah pertahanan, dengan memperhatikan kondisi geografis dan gelar kekuatan TNI. Artinya persiapan ini terkait dengan faktor kecepatan, ketepatan dan keamanan, dan keamanan dukungan yang diberikan kepada komponen utama (TNI) dan komponen cadangan sesuai pegelarannya.
- c) Potensi sumber daya alam yang terindikasi memiliki nilai strategis antara lain :
- (1) Hasil Pertambangan
 - (a) Mineral logam. Terdiri dari :
 - i. Mineral logam dasar, mencakup: timbal, tembaga, seng, timah dan air raksa

ii. Mineral logam mulia, mencakup: emas, perak, platina.

iii. Mineral logam besi dan paduan besi, mencakup: besi sebagai bahan baku laras senjata, baja, mangan sebagai bahan paduan alloy, kromit sebagai bahan pelapis , kobal sebagai bahan paduan, titanium sebagai bahan komposit plate peralatan pertahanan, *molybdenum* sebagai bahan paduan (*alloy*) laras senjata SS-1, nikel sebagai bahan paduan (*alloy*) logam untuk Alutsista, *wolfram*, aluminium sebagai bahan alat utama.

iv. Mineral logam ringan dan logam langka, mencakup: bauksit sebagai bahan baku aluminium dan monosit.

(b) Mineral Non Logam, mencakup:

i. bilumen cair

ii. bilumen padat

iii. aspal

iv. antrasit

v. uranium sebagai bahan baku nuklir

vi. Radium sebagai bahan baku nuklir

vii. Thorium sebagai bahan baku nuklir

viii. Vanadium sebagai bahan paduan

ix. Arsenit sebagai bahan baku bidang kesehatan

x. Antimoni

(c) Non mineral, mencakup:

i. Batubara cair sebagai bahan bakar alternatif untuk alat utama dan transportasi

ii. Phosphor sebagai bahan baku bahan peledak

iii. Nitrogen sebagai bahan baku bahan peledak

iv. Sulfur sebagai bahan reaksi (*dissolving agent*) pembuatan Nitroselulosa

(d) Hasil pengolahan minyak bumi, mencakup:

i. Avtur sebagai bahan bakar pesawat terbang

ii. Bensin sebagai bahan bakar sarana transportasi

iii. Solar sebagai bahan bakar sarana transportasi

iv. Minyak pelumas sebagai bahan pelumas mesin alat utama dan transportasi

(e) Hasil Pengolahan gas alam, mencakup:

- i. Gas bumi yang dicairkan (*Liquid Natural Gas*) sebagai bahan bakar alternatif untuk alat utama dan transportasi
- ii. Gas Hidrokarbon yang dicairkan (*Liquid Petroleum Gas*) sebagai bahan bakar alternatif untuk alat utama dan transportasi
- iii. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan Minyak dan Gas, antara lain :
 - Hulu Migas mencakup: cadangan minyak bumi, cadangan gas bumi, dan produksi minyak dan gas bumi
 - Hilir Migas: pengolahan minyak dan gas bumi yang perlu diperhatikan kilang minyak dan gas bumi saat ini, serta rencana pembangunan kilang minyak. Selanjutnya terkait dengan penyimpanan BBM, guna cadangan operasional BBM dan cadangan penyangga energi (*CPE*), mencakup: jenis *CPE*, jumlah dan waktu *CPE*, lokasi *CPE*, pengelola *CPE*, serta *Roadmap*

(2) Hasil Petro Kimia. Merupakan hasil lanjutan dari pengolahan minyak dan gas bumi yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan, mencakup:

- i. Nafta (Naptha)
- ii. Benzena
- iii. Toluena
- iv. Ksilena (*Xylene*)
- v. Propilena (*propylene*)
- vi. Methanol
- vii. Amoniak
- viii. Parasilena (*Paraxylene*)
- ix. Asam Terefalat Murni (*Purified Terephthalic Acid*)

d) Alat Peralatan Hasil Industri Untuk Pertahanan. Berupa beberapa komponen peralatan (suku cadang) untuk mendukung energi yang diperlukan bagi pertahanan, mencakup :

- (1) Alat Peralatan Energi yang menggunakan Potensi Sumber Daya Alam, berupa :
- (a) Peralatan energi listrik tenaga panas matahari
 - (b) Peralatan energi listrik tenaga ombak
 - (c) Peralatan energi listrik tenaga air terjun
 - (d) Peralatan energi listrik tenaga mikro hidro
 - (e) Peralatan energi listrik tenaga panas bumi

- (f) Peralatan energi listrik tenaga angin
 - (g) Peralatan energi listrik tenaga batubara
- (2) Alat peralatan yang berupa suku cadang. Merupakan beberapa komponen peralatan untuk mendukung pertahanan, berupa :
- (a) Peralatan Zeni
 - (b) Peralatan Komunikasi
 - (c) Peralatan Kesehatan
 - (d) Peralatan Kendaraan bermotor
 - (e) Peralatan Pesawat Terbang
 - (f) Peralatan Angkutan Air
 - (g) Peralatan senjata dan munisi
 - (h) Peralatan Optik (kompas, teropong dan lain-lain)
 - (i) Peralatan Topografi dan Navigasi

2) Permasalahan Cadangan Materiil Strategis

- a) Belum maksimalnya penyediaan materiil strategis untuk kesiapan operasional TNI baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, komponen cadangan, komponen pendukung disetiap komando wilayah pertahanan, yang memenuhi kriteria kecepatan, ketepatan dan keamanan dukungan.
- b) Belum terformulasikan secara rinci sumber daya mineral strategis, serta upaya pengelolaannya bagi kepentingan pertahanan
- c) Belum maksimalnya kajian atau penelitian tentang alat peralatan energi yang menggunakan potensi sumber daya alam

yang terbarukan bagi kepentingan pertahanan Negara.

- d) Belum maksimalnya upaya mengembangkan energi terbarukan untuk mendukung pertahanan Negara.

9. Isu-isu Strategis

- a. Belum terbangunnya komitmen antara kementerian dan lembaga dalam penataan sumber daya alam dan buatan sebagai dasar pembangunan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang dapat mendukung sistem pertahanan negara;
- b. Belum terstandarisasi penataan sumber daya alam dan buatan sebagai dasar pembangunan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis bagi kepentingan pertahanan negara.
- c. Belum tercapainya pencanangan program penataan sumber daya alam dan buatan sebagai dasar pembangunan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis disemua kementerian dan lembaga yang mendukung sistem pertahanan negara.
- d. Belum tersedianya kader yang berkualitas diseluruh lapisan masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat dalam penataan sumber daya alam dan buatan guna membangun logistik wilayah dan cadangan materiil strategis;
- e. Belum Terciptanya kemandirian masyarakat dalam penataan sumber daya alam dan buatan guna pembangunan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.

BAB 3

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

10. Visi

"Tertatanya sumber daya alam dan buatan bagi pembangunan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis sebagai bagian dari pembangunan sistem pertahanan semesta".

11. Misi

- a. Tersedianya fasilitas logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap wilayah pertahanan.
 - 1) Ketersediaan fasilitas logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap wilayah pertahanan sangat penting untuk mendukung operasi perang maupun kedaruratan.
 - 2) Menurut Perpres No. 26 Tahun 2012, Logistik didefinisikan sebagai bagian dari rantai pasok (*supply chain*) yang menangani arus barang, informasi, dan uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*warehousing*), transportasi (*transportation*), distribusi (*distribution*), dan pelayanan pengantaran pengantaran (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*). Pada dasarnya obyek logistik tidak terbatas pada logistik barang, namun mencakup pula logistik penumpang, logistik bencana, dan logistik militer (pertahanan keamanan), sedangkan aktivitas pokok logistik meliputi pengadaan, produksi, pergudangan, distribusi, transportasi, dan pengantaran barang yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis dan industri baik pada sektor primer, sekunder maupun tersier dalam rangka menunjang kegiatan operasionalnya.

- 3). Logistik memerlukan penyusunan sistem logistik yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan efektifitas pergerakan barang, informasi, dan uang mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dituju.
 - 4) Fasilitas logistik berupa perkantoran dan gudang untuk menyimpan bahan-bahan logistik, maupun fasilitas untuk menjamin kualitas bahan, seperti Fasilitas *chiller room*, *container chiller room*, perlu disediakan untuk menjamin kualitas produk-produk yang memerlukan penyimpanan dalam suhu khusus dapat tetap terjaga dengan baik.
- b. Terbangunnya infrastruktur bagi jalur logistik ke wilayah pertahanan statis dan dinamis di setiap wilayah pertahanan. Dengan terbangunnya infrastruktur bagi jalur logistik ke wilayah pertahanan statis dan dinamis di setiap wilayah pertahanan akan memungkinkan pengiriman dukungan logistik, baik berupa bahan pangan dan alat peralatan pertahanan.
- c. Tersedianya cadangan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang memadai di setiap wilayah pertahanan. Ketersediaan cadangan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang memadai di setiap wilayah pertahanan, maka komponen utama, komponen cadangan serta komponen pendukung sumber daya manusia akan mampu mengadakan perlawanan dalam waktu lama. Cadangan logistik wilayah dimungkinkan ketersediaannya apabila:
- 1) Terjadi peningkatan produksi sumber daya alam dan buatan yang dihasilkan pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta yang memiliki nilai ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat di masa damai dan dapat dimanfaatkan pada masa perang, meliputi:
 - a) Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan
 - b) Produksi hasil industri pangan, bahan kain, pakaian, elektronika, kimia, alat peralatan berat dan ringan, dan lain sebagainya.

- c) Hasil pertanian, peternakan dan perikanan berupa bahan pangan diharapkan dapat dikonsumsi sepanjang tahun, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Berapa produksi bahan pangan dimasa damai, hal ini harus dapat diketahui secara pasti baik bahan pangan pokok maupun bahan pangan lainnya.
 - (2) Berapa *stock* bahan pangan nasional yang tersimpan diseluruh wilayah Indonesia.
 - (3) Usaha peningkatan bahan pangan pokok tidak hanya untuk makanan pokok beras, jagung, dan sagu akan tetapi dapat berbentuk ketela, ubi jalar, kacang-kacangan dan lain-lain.
- 2) Tenaga manusia sebagai faktor produksi dikembangkan dan dipersiapkan melalui pengikutsertaan rakyat dalam mengelolaan sumber daya alam dan buatan guna meningkatkan perekonomian nasional termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan.
- 3) Memiliki jaringan jalan pendistribusian di setiap wilayah, mulai dari tempat produksi sampai dengan tempat penggudangan/penyimpanan dan titik distribusi.
- 4) Memiliki instalasi logistik dan badan-badan pengelola logistik yang tergelar diseluruh wilayah dan disesuaikan dengan rencana pertahanan ataupun rencana kontijensi masing-masing wilayah.
- 5) Tersedianya alat peralatan sebagai hasil industri untuk pertahanan, berupa komponen peralatan (suku cadang) untuk mendukung energi yang diperlukan bagi pertahanan, yang mencakup alat peralatan energi yang menggunakan sumber daya alam dan alat peralatan yang berupa suku cadang.

12. Arah Kebijakan

- a. **Tujuan.** Kebijakan penataan sumber daya alam dan buatan komponen pendukung diarahkan untuk mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil yang mampu mendukung wilayah pertahanan statis dan dinamis melalui upaya keterpaduan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan secara terintegratif sehingga bermanfaat bagi kepentingan nasional pada umumnya dan kepentingan pertahanan negara pada khususnya, yang diharapkan adanya peningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Indikator bersifat dampak (*impact*) dari tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penyiapan logistik wilayah
 - a) Tersedianya bahan-bahan logistik yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan bagi komponen pertahanan Negara.
 - b) Terselenggaranya sistem dukungan yang berkesinambungan untuk kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat.
 - c) Tersedianya logistik yang dibutuhkan bila terjadi keadaan darurat atau keadaan perang.
 - 2) Dalam hal penyiapan cadangan materiil strategis
 - a) Terwujudnya dukungan materiil strategis yang efektif dan efisien disetiap komando wilayah pertahanan bagi komponen utama dan komponen cadangan dihadapkan kepada kondisi geografis Indonesia
 - b) Tersedianya dukungan materiil strategis bagi komponen utama dan komponen cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat atau keadaan perang disetiap komando wilayah pertahanan.

b. **Sasaran strategis.** Sasaran yang akan dicapai dalam penataan sumber daya alam dan buatan ini adalah:

- 1) Terjaminnya ketersediaan bahan-bahan logistik, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a) Terwujudnya optimalisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan serta pendayagunaan sumber daya alam untuk logistik wilayah dan cadangan materil strategis antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
 - b) Terwujudnya peningkatkan produksi sumber daya alam dan buatan yang dihasilkan pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta yang memiliki nilai ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat di masa damai dan dapat dimanfaatkan pada masa perang, meliputi:
 - (1) Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan
 - (2) Produksi hasil industri pangan, bahan kain, pakain, elektronika, kimia, alat peralatan berat dan ringan, dan lain sebagainya.
 - (3) Hasil pertanian berupa bahan makanan diharapkan dapat dikonsumsi sepanjang tahun, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Harus dapat diketahui secara pasti berapa hasil produksi pangan suatu wilayah pada masa damai.
 - (b) Harus dapat diketahui secara pasti berapa stock nasional yang tersimpan diseluruh wilayah Indonesia.

- (c) Usaha peningkatan bahan pangan pokok, berupa beras, jagung, dan sagu, disamping itu bahan pangan lainnya, seperti ketela, ubi jalar, kacang-kacangan dan lain-lain.
- c) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai faktor produksi dalam mengelola sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah.
- d) Terlaksananya peningkatan pembangunan jaringan jalan pendistribusian di komando wilayah pertahanan, mulai dari tempat produksi sampai dengan tempat penggudangan/ penyimpanan dan titik distribusi.
- e) Tertatanya instalasi logistik dan badan-badan pengelola logistik yang tergelar diseluruh wilayah dan disesuaikan dengan rencana pertahanan ataupun rencana kontijensi masing-masing wilayah.
- 2) Terjaminnya peningkatan kemampuan logistik wilayah, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
- a) Terdukungnya kebutuhan pokok untuk kepentingan pertahanan Negara pada saat perang, sesuai bekal kebutuhan bekal kelas I s.d Kelas V yang ditentukan
- b) Terkelolanya bahan industri yang bersifat strategis untuk kepentingan perang, seperti bahan tambang, kapas, karet, kulit, kelapa sawit dan lain-lain
- c) Meningkatnya kemampuan pemanfaatan energi yang berasal dari wilayah itu sendiri, seperti : energi tenaga air, matahari, panas bumi, dan lain sebagainya.
- d) Tersedianya alat transportasi yang mampu mendistribusikan bekal ulang yang dapat diselenggarakan dengan cepat dan tepat waktu, serta tepat sasaran.

- e) Tertatanya kembali gudang-gudang penyimpanan bahan logistik yang tergelar di setiap komando wilayah pertahanan.
- 3) Terjaminnya kesiapan operasional cadangan materiil strategis, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
- Terwujudnya peningkatan kemampuan dukungan efektif sesuai dengan kondisi geografis Indonesia
 - Terjaminnya ketersediaan yang mampu memberikan dukungan dalam jumlah yang diperlukan oleh komponen utama (TNI) dan komponen cadangan pada operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
 - Terjaminnya ketersediaan cadangan materiil strategis minimal di lima pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil.
 - Terjaminnya kesiapan cadangan materiil strategis yang dipersiapkan di setiap wilayah pertahanan, dengan memperhatikan kondisi geografis dan gelar kekuatan TNI, faktor kecepatan, ketepatan dan keamanan dukungan yang diberikan kepada komponen utama (TNI) dan komponen cadangan sesuai pergelarannya.
- c. **Sasaran pokok 2015-2039.** Sasaran pokok yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut :
- Terbangunnya komitmen disemua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membangun logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Terwujudnya Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam penataan sumber daya alam dan buatan untuk kepentingan pertahanan negara dengan kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah.

- b) Terlaksananya optimalisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan penataan sumber daya alam dan buatan antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, agar dapat didayagunakan untuk membangun logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
- 3) Tersepakatnya mineral strategis yang mendukung pembangunan alat utama sistem senjata (Alutsista) dan *advance technology*, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a) Ditemukannya dan disepakatinya mineral strategis yang menjadi bahan dasar yang mendukung pembuatan Alutsista dan *advance technology*.
 - b) Terbangunnya industri yang didukung penguasaan teknologi yang berbasis mineral strategis yang mendukung pembuatan Alutsista dan *advance technology*.
- 4) Meningkatnya kemampuan aparatur komando kewilayahan TNI dalam penyiapan logistik wiayah dan cadangan materiil strategis, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :
- a) Meningkatnya jumlah aparatur komando kewilayahan TNI yang mampu memberikan supervisi kepada masyarakat dalam penyiapan logistik wiayah dan cadangan materiil strategis.
 - b) Meningkatnya jumlah aparatur komando kewilayahan TNI yang mampu memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga di daerah dalam penyiapan logistik wiayah dan cadangan materiil strategis.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis untuk kepentingan kesejahteraan dan pertahanan, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatnya produksi sumber daya alam dan buatan yang dihasilkan pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta
 - b) Terpenuhinya kebutuhan pangan, obatan-obatan yang bersumber dari sumber daya alam dan buatan.
- 6) Tersedianya logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap komando kewilayahan, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- a) Tersediannya sentra-sentra produksi suku cadang alat peralatan pertahanan
 - b) Tersediannya sentra-sentra produksi pangan, pakaian dan obatan-obatan dan kebutuhan logistik lainnya bagi masyarakat.
- 7) Terbangunnya infrastruktur dalam penyiapan fasilitas logistik dan jalur pengiriman logistik wilayah dan cadangan materiil startegis pada setiap wilayah komando wilayah pertahanan.
- a) Tersedianya fasilitas logistik
 - b) tersedianya jalur distribusi logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
- d. **Strategi.** Guna mewujudkan sasaran pokok, diperlukan strategi sebagai berikut :
- 1) Membangun kelembagaan yang dapat mengintegrasikan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam membangun logistik wilayah dan cadangan materiil strategis sebagai komponen pendukung pertahanan negara;
 - 2) Menyusun standardisasi, norma, kriteria sumber daya alam dan buatan untuk pembangunan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis sebagai komponen pendukung pertahanan negara;
 - 3) Membentuk kader yang berwawasan pertahanan yang mendukung pembangunan dalam rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis komponen pendukung pertahanan negara

- sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta;
- 4) Meningkatkan kemampuan masyarakat guna berpartisipasi dalam membangun logistik wilayah dan cadangan materiil strategis sebagai komponen pendukung pertahanan negara, dan
 - 5) Melakukan supervisi dan pengawasan kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah guna menjamin ketersediaan infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas logistik dan cadangan materiil strategis serta dukungan jalur logistik yang terpantau melalui mekanisme K3I (Komando, Komunikasi, Kendali, Informasi)

ALUR DESAIN PENATAAN SDAB KOMDUK HANNEG



ARAH KEBIJAKAN PENATAAN SDA/B

ARAH KEBIJAKAN PENATAAN SDA/B ADALAH MEWUJUDKAN LOGistik WILAYAH DAN CADMATSTRAT YANG MAMPU MENDUKUNG WILAYAH PERTAHANAN STATIS DAN DINAMIS

DAMPAK : TERWUJUDNYA PENYIAPAN LOGistik WILAYAH DAN CADANGAN MATERIIL STRATEGIS YANG TERPADU DAN BERSINERGI, MELALUI UPAYA KONSOLIDASI, KOORDINASI, SINERGI DAN INTEGRASI ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DAN PEMERINTAH DAERAH.

STRATEGI : DILAKSANAKAN MELALUI MEMBANGUN KELEMBAGAAN, NSPK, PEMBENTUKAN KADER, PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT, SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Sasaran
Pokok
2015-
2039

Terbangunnya komitmen
di semua K/L dan Pemerintah
Daerah dalam penataan
sumber daya alam dan
buatan

Tersepakatnya mineral
strategis yang mendukung
pembangunan alutsista dan
advance technology

Terwujudnya peningkatan
kemampuan aparatur komando
kewilayahan TNI dalam
penyiapan Logwil dan
Cadmatstrat

Tersedianya logistik wilayah
dan codmatstrat di setiap
wilayah pertahanan

Terwujudnya peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
penyiapan Logwil dan
Cadmatstrat di setiap
wilayah pertahanan

Terbangunnya infrastruktur dalam
penyiapan fasilitas logistik dan
jalur pengiriman Logwil dan
Codmatstrat di setiap wilayah
pertahanan.

Lestari alamku lestari deraku
Dimana Tuhanku menitipkan aku
Nyanyi bocah-bocah di kala purnama
Nyanyikan pujaan untuk nusa

Damai raudaraku suburlah bunyiku
Kuning iluku dongengkan cerita
Kisah tentang jaya nusantara lama
Tentram kartaraha raja di rana

Mengapa tanahku rawan kini
Bukit bukitpun telanjang berdiri
Pohon dan rumput enggan bersemi kembali
Burung-burungpun malu bernyanyi

Kuning bukitku hijau kembali
Semak rumputpun tak sabar menanti
Do'a kan kuncapkan hari demi hari
Kapankah hati ini lapang diri....

BAB 4

TAHAPAN PENATAAN 2015 - 2039 DAN KERANGKA KERJA

- 13. Sasaran Lima Tahun Pertama 2015 – 2019.** Sasaran pada lima tahun pertama difokuskan pada **penataan** mencakup konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan penataan Sumber Daya Alam dan Buatan di antara Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Komponen bangsa lainnya, yang diwujudkan dalam upaya pembentukan Sistem Manajemen terpadu dan bersinergi, serta Pedoman Penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis yang komprehensif dan implementatif, yang menyatukan langkah para pemangku kepentingan pelaksana Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan, dengan pokok kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, yang mencakup: pendataan, penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan buatan yang mendukung pertahanan Negara, pengembangan Norma Standar Prosedur dan Kriteria sumber daya alam dan buatan, penyediaan dan perbaikan fasilitas logistik wilayah dan jalur logistik ke wilayah pertahanan statis (pangkalan, daerah latihan, daerah peluncuran Alutsista), mengevaluasi kesesuaian antara tata ruang wilayah dan tata ruang wilayah pertahanan, mengikutsertakan instansi vertikal Kementerian Pertahanan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 - b. Menyusun *Roadmap* 2015-2019
 - c. Membangun Kelembagaan yang memungkinkan terlaksananya koordinasi dan sinkroniasi program Penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis Komponen Pendukung Pertahanan Negara
 - d. Menyelenggarakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Aparatur

kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan guna penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.

- e. Melaksanakan pendataan yang mencakup : kebutuhan bekal kelas I s.d kelas V satuan TNI di seluruh komando wilayah pertahanan, sumber bekal dan jalur pembekalan dalam pemenuhan tugas rutin dan tugas operasi, menganalisis kebutuhan pangan dan upaya pemenuhannya disetiap wilayah pertahanan, serta menganalisis kontribusi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pembangunan pertahanan yang menyangkut logistik wilayah dan cadangan materiil strategis mulai dari hulu hingga hilir.
- f. Melaksanakan pengkajian/penelitian dan pengembangan terkait dengan sumber daya alam dan cadangan materiil strategis yang dibutuhkan bagi pertahanan negara.
- g. Peningkatan kapasitas melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target 16.247desa/kelurahan.
- h. Memaksimalkan fungsi organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di seluruh Indonesia, dengan memanfaatkan forum bela negara atau forum lain yang dibina oleh kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah, untuk berpartisipasi dalam pembangunan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, guna membantu proses penataan.
- i. Membentuk dan membina masyarakat dalam mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap wilayah pertahanan, yang siap digerakkan pada saat kegawatdaruratan dan keadaan perang.
- j. Membangun, mendata, mengevaluasi infrastruktur fasilitas logistik dan jalur logistik pada wilayah pertahanan statis dan dinamis.

- 14. Sasaran Lima Tahun kedua 2020 – 2024.** Sasaran pada lima tahun kedua difokuskan pada penganalisaan dan pengevaluasian hasil pengkajian/penelitian dan pengembangan terkait sumber daya alam dan cadangan materiil strategis melalui upaya konsolidasi,

koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan Penataan dan Pembinaan sumber daya alam dan buatan di antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan Komponen bangsa lainnya, yang belum tertata pada tahap sebelumnya, dengan pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan Penataan terpadu tahap 1.
- b. Menyusun *Roadmap* 2020-2024.
- c. Melaksanakan pendataan yang mencakup: kebutuhan bahan kelas I s.d kelas V satuan TNI di seluruh wilayah pertahanan, sumber bahan dan jalur pembekalan dalam pemenuhan tugas rutin dan tugas operasi, menganalisis kebutuhan pangan dan upaya pemenuhannya disetiap wilayah pertahanan, serta menganalisis kontribusi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pembangunan pertahanan yang menyangkut logistik wilayah dan cadangan materiil strategis mulai dari hulu hingga hilir.
- d. Menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) bagi peningkatan kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan bagi aparatur kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terkait dengan penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
- e. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengkajian/penelitian dan pengembangan terkait dengan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang dibutuhkan bagi pertahanan negara
- f. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target 16.247 desa/kelurahan.
- g. Memaksimalkan fungsi organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di seluruh Indonesia.
- h. Melaksanakan inovasi penyebarluasan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui berbagai media
- i. Melakukan kebijakan pemberian insentif bagi penggiat pemberdayaan wilayah pertahanan.

- j. Membentuk dan membina masyarakat dalam mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap komando wilayah pertahanan, yang siap digerakan pada saat kegawatdaruratan dan keadaan perang, melalui gladi posko dan gladi lapang.
- k. Membangun, mendata, mengevaluasi infrastruktur fasilitas logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah pertahanan yang terakses instalansi TNI melalui mekanisme komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I) .

15. Sasaran Lima Tahun ketiga 2025 – 2029. Sasaran pada lima tahun ketiga difokuskan pada membuat arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan cadangan strategis untuk pertahanan negara dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah terhadap hasil dan evaluasi pengkajian/penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan buatan dan cadangan materiil strategis disertai penerapan prinsip konservasi melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan penataan sumber daya alam dan buatan di antara kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya, yang telah tertata namun belum sempurna dan perlu dimantapkan, dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan Penataan SDA/B terpadu tahap 2.
- b. Menyusun *Roadmap* 2025-2029
- c. Menyelenggarakan Sosialisasi, Bimnis serta pendidikan dan Pelatihan SDM bagi peningkatan kemampuan pemberdayaan wilayah Pertahanan bagi aparatur kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dengan penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
- d. Membuat arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan cadangan materiil strategis untuk pertahanan negara dengan kementerian/lembaga terkait terhadap hasil dan evaluasi pengkajian/penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan buatan dan cadangan materiil strategis disertai penerapan prinsip konservasi.
- e. Memantapkan peran kader pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai *change of agent* yang menyebar

- luaskan pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan, melalui kegiatan sosialisasi.
- f. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target 16.247 desa/kelurahan.
 - g. Mengembangkan inovasi-inovasi penyebarluasan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui berbagai media.
 - h. Melakukan kebijakan pemberian insentif bagi penggiat pemberdayaan wilayah pertahanan
 - i. Membentuk dan membina masyarakat dalam mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di setiap wilayah komando wilayah pertahanan, yang siap digerakkan pada saat kegawatdaruratan dan keadaan perang, melalui pembentukan satgas pertahanan, serta gladi posko dan gladi lapang.
 - j. Membangun, mendata, mengevaluasi infrastruktur fasilitas logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah pertahanan yang terakses instalansi TNI melalui mekanisme komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I).

16. Sasaran lima tahun keempat (2030 – 2034). Sasaran pada lima tahun keempat difokuskan pada memperkuat kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis untuk pertahanan negara dengan tetap menerapkan prinsip konservasi melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan Penataan sumber daya alam dan buatan di antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya, yang telah tertata diperkuat untuk memperkokoh perwujudan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, temuan-temuan kendala serta solusinya, dan diperkuat melalui inovasi-inovasi agar pelaksanaan Penataan sumber daya alam dan buatan berdaya hasil optimal, dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan penataan sumber daya alam dan buatan terpadu tahap 3
- b. Menyusun *Roadmap* 2030-2034.

- c. Memperkuat kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dan cadangan materiil strategis untuk pertahanan Negara dengan tetap menerapkan prinsip konservasi.
- d. Memperkuat peran kader pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai '*agent of change*' yang menyebarluaskan pemberdayaan wilayah pertahanan.
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis. minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target 16.247 desa/kelurahan.
- f. Memantapkan peran satgas bela negara perbantuan logistik wilayah dan cadangan, materiil strategis sesuai lingkup bidangnya di dalam mengatasi situasi kedaruratan, melalui gladi posko dan gladi lapang menghadapi kedaruratan dan keadaan perang.
- g. Memelihara dan mengembangkan peran organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya di dalam mengimplementasikan pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai kompetensi dalam setiap kondisi.
- h. Menyiapkan keterlibatan secara aktif peran masyarakat dalam fungsi pemberdayaan wilayah di setiap kondisi, baik dimasa damai maupun dimasa perang di setiap komando wilayah pertahanan.
- i. Membentuk dan membina masyarakat dalam mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil startegis di setiap komando wilayah pertahanan.
- j. Memelihara dan mengembangkan infrastruktur fasilitas logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah pertahanan yang terakses instalansi TNI melalui mekanisme komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I).

17. Sasaran lima tahun kelima (2035–2039). Sasaran pada lima tahun kelima difokuskan pada **pengayaan/pengembangan** upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan Penataan sumber daya alam dan buatan di antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya, yang menjamin kesinambungan penataan sumber daya alam dan buatan komponen pendukung pertahanan negara, dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Terpadu tahap 4.
- b. Menyusun *Roadmap* 2035-2039.
- c. Melaksanakan pengkajian/penelitian dan pengembangan terkait dengan sumber daya alam dan cadangan materiil strategis yang dibutuhkan bagi pertahanan negara.
- d. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis minimal 1 desa/kelurahan 1 kader, dengan target 16.247 desa/kelurahan.
- e. Mengembangkan peran seluruh potensi bangsa dalam mendukung fungsi penyiapan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dalam setiap kondisi damai maupun perang.



Gambar Tahapan Penataan SDA/B Komponen Pendukung Pertahanan Negara

18. Kerangka Kerja Pelaksanaan

- a. Indikator Dampak (*impact*). Terwujudnya pelaksanaan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang terpadu dan bersinergi, melalui upaya konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

b. Indikator Hasil (*outcome*) pelaksanaan

- 1). Terwujudnya Sistem Penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang solid dan teruji, yang didukung oleh keterpaduan dan sinergi dari unsur-unsur :
 - a) Penerbitan perangkat kebijakan tentang Penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis yang terpadu di antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - b) Terbangunnya jaringan koordinasi dalam penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan Ormas dalam membentuk komponen pendukung pertahanan negara.
 - c) Tersedianya sumber daya manusia pemberdayaan wilayah yang mendukung proses penataan dan pembinaan SDA/B melalui:
 - (1) pembentukan kader pemberdayaan wilayah pertahanan yang dididik dan dilatih sehingga mampu berperan sebagai *agent of change* dalam menata dan membina sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis setiap provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
 - (2) Proses pembentukan kader pemberdayaan wilayah pertahanan melibatkan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya di seluruh Indonesia.
- 2) Terbangunnya infrastruktur berupa fasilitas logistik dan jalur logistik yang ke wilayah pertahanan statis dan dinamis, dimana perencanaan dan pelaksanaan

saling mendukung dan saling melengkapi atau bersinergi di antara Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya yang mampu memberi dukungan pada wilayah pertahanan statis dan dinamis.

- c. Indikator Keluaran (*output*) yang merupakan keluaran dari pelaksanaan berbagai kegiatan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis , dan indikator proses, serta indikator *Input* pelaksanaaan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, di jabarkan oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah terkait serta, pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga yang bersangkutan.

BAB 5

STRATEGI PELAKSANAAN

PENATAAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN GUNA MEWUJUDKAN LOGISTIK WILAYAH DAN CADANGAN MATERIIL STRATEGIS

- 19. Strategi Pelaksanaan.** Strategi pelaksanaan Penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis dilaksanakan di setiap tingkat, mendasarkan kategorisasi ruang lingkup Rancangan Induk sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis sebagai berikut :
- a. Lingkup makro dan lingkup Meso merupakan pelaksanaan di tataran nasional, sedangkan lingkup mikro merupakan tingkat pelaksanaan di tataran kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
 - b. Pelaksanaan di lingkup Makro berkaitan dengan penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan penataan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan kebijakan tentang Penataan sumber daya alam dan buatan guna mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil wilayah;
 - 2) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan penataan sumber daya alam dan buatan guna mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil wilayah.
 - c. Pelaksanaan di lingkup meso mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Menjalankan fungsi manajerial.
 - 2) Menterjemahkan kebijakan makro.

- 3) Mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di tingkat kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Pelaksanaan di lingkup Mikro berkaitan dengan implementasi kebijakan program percepatan Penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis, sebagaimana digariskan melalui tingkat pusat menjadi bagian dari upaya percepatan penataan di masing-masing kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sumber daya alam. Sumber daya alam yang diarahkan untuk pertahanan Negara, yang berkaitan dengan:
 - a) Eksplorasi bahan tambang (minyak, gas alam, batubara, tembaga, dan uranium dibina oleh Pemda dikoordinasikan dengan Kementerian Pertambangan Energi dan Kementerian Pertahanan.
 - b) Sumber daya alam yang berkaitan dengan hutan, pertanian, air dibina oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertahanan.
 - c) Energi dan sumber daya mineral dibina oleh Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan.
 - 2) Sumber daya buatan yang diarahkan untuk pertahanan Negara yang berkaitan dengan :
 - a) Telekomuniaksi dibina oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.
 - b) Listrik dibina oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan.
 - c) Industri materiil dibina oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Kementerian

- Perindustrian yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan logistik wilayah, seperti peralatan konstruksi, peralatan kendaraan, suku cadang, alat komunikasi, dan lain-lain.
- d) Industri bahan makanan dibina oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertahanan diarahkan untuk mencukupi kebutuhan logistik wilayah.
 - e) Industri obat-obatan dibina oleh Pemerintah Daerah di Koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan yang diarahkan untuk mencukupi kebutuhan logistik wilayah.
- 3) Infrastruktur Logistik. Infrastruktur logistik mencakup fasilitas logistik dan fasilitas jalur distribusi serta sarana yang diarahkan untuk Pertahanan Negara yang berkaitan dengan:
- a) Pelabuhan Udara dibina oleh Pemerintah Daerah, dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.
 - b) Pelabuhan Laut dibina oleh Pemerintah Daerah, dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.
 - c) Galangan Kapal dibina oleh Pemerintah Daerah, dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan.
 - d) Industri pangan, Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, industry tekstil, kulit. Alas kaki, dan aneka, Industri alat transportasi, Industri elektronika dan telematika/ICT, Industri pembangkit energy, Industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan Jasa Industri, Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara yang dibina oleh Kementerian Perindustrian dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan, sedangkan industri strategis pertahanan dibina

- Kementerian Pertahanan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN.
- e) Sarana Perhubungan (darat, laut dan udara) dibina oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan di daerah oleh pemerintah daerah, keduanya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan.
 - f) Jalan-jalan dibina oleh Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan.
 - g) Sarana bengkel, komunikasi, angkutan dibina oleh pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan instansi terkait dan Kementerian Pertahanan.
 - h) Sistem pergudangan perlu ditata, karena gudang merupakan suatu fasilitas yang berfungsi sebagai penyaluran bahan logistik sampai kepada pemanfaatan.

20. Prosedur Pembinaan. Dalam melaksanaan penataan sumber daya alam dan buatan memerlukan proses pembinaan, sebagai berikut :

a. Subjek.

- 1) Subjek Pembina adalah penanggung jawab pembinaan, yaitu Kementerian Pertahanan di tingkat pusat dan pelaksana tugas dan fungsi kementerian pertahanan di daerah pada tingkat daerah.
- 2) Secara teknis pembinaan dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana sumber daya alam dan buatan tersebut berada.

b. Objek

- 1) Personel. Objek personel dalam pembinaan sumber daya alam dan buatan adalah orang yang mengelola sumber daya alam dan buatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tingkat Pusat. Objek pembinaannya adalah personel yang berada di kementerian/lembaga yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan
 - b) Tingkat Daerah. Objek pembinaannya adalah personel pemerintah daerah yang bertugas mengelola sumber daya alam dan buatan yang ada di daerahnya.
- 2) Sumber daya alam dan buatan. Objek pembinaan adalah sumber daya alam dan buatan yang telah ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan, melalui proses pendataan, pemilahan sesuai dengan standardisasi.
- c. Metode. Untuk tercapainya upaya pembinaan pada subjek dan objek, metode yang digunakan adalah :
- 1) Koordinasi. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah amat penting di dalam proses pembinaan sumber daya alam dan buatan yang diarahkan untuk kepentingan pertahanan negara. Koordinasi dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain: rapat koordinasi, Keputusan Bersama (KB), Perjanjian Kerjasama (PKS) dan lain-lain.
 - 2) Sosialisasi. Sosialisasi tentang sumber daya alam dan buatan sebagai komponen pendukung pertahanan Negara ditujukan kepada semua personel pembina yang berada di kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah serta masyarakat, melalui kegiatan seminar, ceramah dan diskusi..
 - 3) Fasilitasi. Fasilitasi yang diberikan dapat berupa insentif dan penyediaan perangkat lunak, dan perangkat keras kepada personel pengelola sumber daya alam dan buatan yang telah ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Insentif yang diberikan dapat berupa pajak, kemudahan dalam import atau kemudahan dalam berusaha guna mendorong industri yang berbasis mineral. Dalam hal pemberian fasilitas yang bukan wewenang kementerian pertahanan akan dikoordinasikan

- dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait.
- 4) Bimbingan teknis. Bimbingan teknis diberikan kepada personel pada perumus kebijakan dan pengelola, serta kelompok masyarakat yang akan dibina.
 - 5) Partisipatif. Tujuan yang ingin dicapai dengan metode partisipatif adalah kepada pembuat kebijakan dan pengelola sumber daya alam dan buatan ikut bersama-sama merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya alam dan buatan yang diarahkan untuk pertahanan negara.
 - 6) Pemeranhan melalui kegiatan gladi posko dan gladi lapang
 - 7) Integrasi dalam tataran kebijakan dan program penataan sumber daya alam dan buatan dalam rangka penyatuan langkah.
 - 8) Inspeksi. Inspeksi dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan buatan yang telah memenuhi syarat betul-betul telah dipersiapkan dan tersedia di setiap wilayah pertahanan.

21. Pengelolaan Penerapan Strategi Penataan Logistik Wilayah dan Cadangan Materiil Strategis, sebagai berikut :

- a. Penerapan setiap strategi Penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis melalui tahapan:
 - 1) Perencanaan strategi
 - 2) Implementasi strategi
 - 3) Monitoring proses implementasi strategi
 - 4) Evaluasi Hasil Implementasi strategi
 - 5) Revisi atau perbaikan penerapan strategi berdasarkan hasil evaluasi
- b. Kegiatan pelaksanaan penataan dan pembinaan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis diselaraskan dengan kegiatan di masing-masing kementerian/lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah terkait.

- 22. Strategi Implementasi Penataan dan Pembinaan.** Ada 6 (enam) Strategi Implementasi Penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang direncanakan di dalam rencana induk penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, yaitu :
- a. Strategi Implementasi melalui penguatan kelembagaan.
 - 1) Membangun komitmen melalui Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/ lembaga di luar bidang pertahanan serta pemerintah daerah yang terkait dalam hal ketersediaan logistik dan cadangan materiil strategis yang mendukung wilayah pertahanan statis dan dinamis.
 - 2) Memformulasikan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis yang bersifat strategis yang diwujudkan dalam bentuk logistik wilayah dan cadangan materiil strategis bagi kepentingan pertahanan negara.
 - 3) Melakukan survey logistik wilayah dan cadangan materiil strategis disetiap wilayah pertahanan.
 - 4) Menyiapkan buku pedoman pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyiapkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di semua wilayah pertahanan.
 - b. Strategi Implementasi melalui Pemberdayaan.
 - 1) Memberdayakan kemampuan dan menumbuhkembangkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
 - 2) Pemberdayaan di lingkup pemerintah dan lingkup masyarakat dilakukan melalui:
 - (a) Penetapan regulasi
 - (b) Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis
 - (c) Pemberian penghargaan

- 3) Salah satu pokok kegiatan Kementerian Pertahanan di lima tahun kedua (2020-2024) adalah melakukan kebijakan pemberian insentif bagi penggiat penataan sumber daya alam dan buatan.

c. Strategi Implementasi melalui sosialisasi

- 1) Sosialisasi penataan sumber daya alam dan buatan ditujukan untuk membangun kesadaran kolektif tentang perlunya kesadaran akan pentingnya penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, yang merupakan unsur penting dalam pertahanan negara Republik Indonesia.
- 2) sumber daya alam dan buatan sebagai Sosialisasi penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dioptimalkan melalui berbagai kegiatan di antaranya: sarasehan, pesta rakyat, penyebaran *leaflet*, *booklet*, iklan layanan masyarakat, poster, film, jurnal, majalah berkala dan media sosial lainnya yang dapat memberikan ‘Gaung’ pentingnya penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis secara nasional.
- 3) Salah satu pokok kegiatan Kementerian Pertahanan di lima tahun kedua (2020-2024) dan lima tahun ketiga (2025-2029) adalah melaksanakan inovasi-inovasi penyebarluasan pentingnya penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis melalui berbagai media.
- 4) Unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam mensukseskan strategi sosialisasi penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis agar berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, antara lain :
 - a) Sistem sosialisasi bertahap, berjenjang yang terjadwal dengan baik
 - b) Sistem sosialisasi yang konvensional (tatap muka) langsung dengan yang akan ditulari nilai-nilai kemandirian logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, melalui

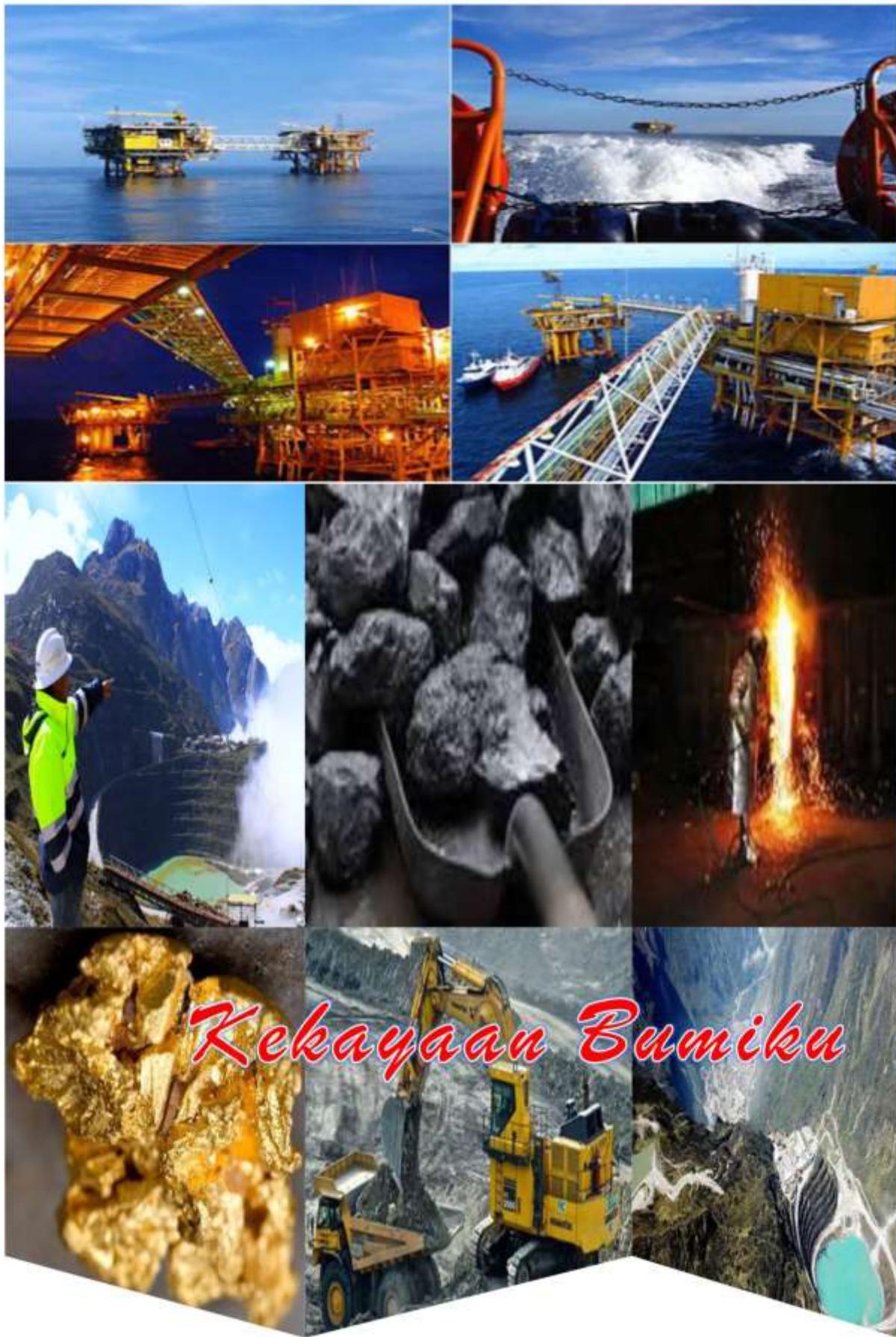
- komunikasi 2 (dua) arah lebih efektif ketimbang satu arah berupa ceramah.
- c) Sistem sosialisasi yang mewajibkan peserta sosialisasi diuji atau di test pemahaman materi tentang kemandirian logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, melalui *pre test* dan *post test*.
 - d) Penyediaan sarana sosialisasi yang memadai atau mencukupi untuk seluruh sasaran yang ingin ditanamkan.
 - e) Sistem sosialisasi yang melibatkan atau menugaskan dengan jelas dan tegas koordinasi dari unsur-unsur yang terkait di setiap tataran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, disertai surat penugasan bagi pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam mensosialisasikan penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
- d. Strategi Implementasi melalui pembentukan kader penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
- 1) Pembentukan kader penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis yang berperan sebagai *agent of change*, yang berada di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan prioritas sasaran di wilayah perbatasan dan wilayah yang berpotensi terjadi konflik.
 - 2) Selanjutnya seluruh kader penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dapat diambil dari Forum Bela Negara atau forum lain yang dibina oleh Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan bersama pemerintah daerah yang berada di setiap kabupaten/kota, yang diketuai dan dibina *ex officio* oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
 - 3) Keberlangsungan Kader penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan

cadangan materiil dan strategis dibina oleh Kementerian Pertahanan.

- e. Strategi Implementasi melalui Kerjasama dan Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - 1) Membangun kerjasama dan koordinasi pelaksanaan penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan yang sinergis secara berkesinambungan, termonitor dan terjadwal di antara semua pemangku kepentingan yaitu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya.
 - 2) Menjaga kerjasama dalam pelaksanaan penataan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis agar dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah disepakati melalui: keterbukaan, pengertian dan saling menghargai.
 - 3) Unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam mensukseskan strategi melalui kerjasama dan koordinasi pelaksanaan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis , antara lain:
 - a) Penunjukkan koordinator yang bertanggung jawab. Hal ini untuk melancarkan pelaksanaan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang terpadu.
 - b) Adanya sistem yang menjamin terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, melalui pembentukan Tim Terpadu, perangkat kebijakan, sarana atau format baku untuk monev terkait koordinasi di antara kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
- f. Strategi Implementasi melalui penyiapan infrastruktur. Kementerian Pertahanan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah melakukan penyiapan infrastruktur untuk membangun fasilitas logistik

dan jalur logistik guna mendukung wilayah pertahanan statis dan wilayah pertahanan dinamis.

- g. Pengawasan dan Pengendalian implementasi pembangunan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis bagi sistem pertahanan negara melalui K3I (Komando, Kontrol, Komunikasi, dan Informasi).



BAB 6

ROADMAP LIMA TAHUN PERTAMA 2015 - 2019

23. Sumber Daya Alam Menjadi Basis Dalam Pembangunan.

- a. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, bahwa sumber daya alam menjadi basis dalam pembangunan secara menyeluruh untuk mencapai keunggulan kompetitif di bidang perekonomian yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Oleh karena peranan sumber daya alam sebagai basis pada pembangunan secara keseluruhan sangat strategis, maka diharapkan pula hasil produk sumber daya alam dapat digunakan untuk mewujudkan dukungan pertahanan khususnya sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis. Adapun keberadaan sumber daya alam yang dapat mendukung pertahanan negara, khususnya bahan-bahan mineral yang sangat strategis untuk kepentingan *advance technologi* dan Alutsista, harus dapat dilindungi dan harus dibatasi penjualannya, dengan prioritas utama guna mendukung kepentingan pemenuhan kebutuhan kemandirian industri dalam negeri.
- b. Mineral merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang bersifat strategis, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara. Hal ini dikarenakan mineral digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan alat peralatan pertahanan, seperti senjata, amunisi, roket, dan alat peralatan pertahanan lainnya. Pada konteks pendayagunaan mineral sebagai cadangan materiil strategis yang merupakan bagian dari komponen pendukung yang diwujudkan sejalan dengan pembangunan nasional, berfungsi untuk meningkatkan kemampuan komponen utama (TNI) dan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer.

Tabel 1

**Daftar Mineral yang penting dibutuhkan Untuk Kepentingan
Pertahanan**

NO	LOGAM	MINERAL	PEMANFAATAN
1	2	3	4
1	Aluminium (Al)	Bauksit	Peluru kendali, pesawat terbang, mesin kendaraan, komponen roket
2	Besi (Fe)	Hematit, magnetit, lateritic	Bahan baku baja, kendaraan tempur
3	Nikel (Ni)	Saprolit, limonit	Baja tahan karat, katalis, alloy
4	Kobalt (Co)	Saprolit, limonit	Katalis, alloy
5	Khrom (Cr)	Khromit	Stainless steel, tahan abrasi dan korosi, foundry, bahan kimia untuk industry manufaktur
6	Titanium (Ti)	Pasir besi, Ilmenit	Alloy, materiil tahan panas
7	Vanadium (V)	Pasir besi, ilmenit,	Alloy
8	Molibdenum (Mo)	Bijih Tembaga Porfiri Cu-Mo,	Komponen peluru kendali dan kendaraan luar angkasa, katalis refinery minyak bumi, filament elektronik, baja kekuatan ultra tinggi, pembangkit tenaga nuklir, desalinasi air laut, bahan penggunaan nano teknologi
9	Tungsten (W)	Wolframit Terak Peleburan Timah (Tantalite-Columbite)	Bola lampu listrik, tabung televisi, tabung X-Ray, super alloy, tool untuk logam, penggeraan logam dan peralatan

			tambang
10	Logam tanah jarang a. skandium (Sc), b. yitrium (Y), c. lantanum (La), d. serum (Ce), e. praseodiumium (Pr), f. neodimium (Nd), g. samarium (Sm), h. europium (Eu), j. gadolinium (Gd), k. terbium (Tb), l. disprosium (Dy), m. holmium (Ho),	Monazite, xenotime, zircon	Komponen peralatan persenjataan, paduan, motor hybrid, generator, lampu flooresen, plasma screen, computer, celluler phone
11	Mangan (Mn)	Pirolusit	Penggunaan metallurgi, alloy, baja kekuatan tinggi, rel kereta api
12	Timah Putih (Sn)	Kaseterit	Electronic, ceramic, chemical
13	Timah hitam (Pb)	Galena	Electronic, Baterai
14	Seng (Zn)	Spalerit	Pelindung bahan konstruksi, ceramic
15	Emas (Au)	Gangue mineral	Elektronik, komponen komputer
16	Perak (Ag)	Gangue mineral	Elektronik, komponen komputer
17	PGM (Pt, Pd, Rh) Paladium (Pd) Platinum (Pt) Rhodium (Rh)	Gangue mineral Copper Anode Slime (Bijih Tembaga dan Bijih Emas)	Elektronik, katalis
18	Antimon (Sb)	Stibnite	Elektronik, solar sel, chemical
19	Silika (Si)	Silikat	Alloy, solar sel, glass, ceramic
20	Selenium (Se)	Calcopirit Copper Anode Slime (Bijih Tembaga)	Elektronik
21	Teluroid (Te) Tellurium (Te)	Calcopirit Copper Anode	Elektronik

		Slime (Bijih Tembaga)	
22	Tembaga (Cu)	Calcopirit	Kabel, elektronik,
23	Zirkon (Zr)	Zirkonia	Bahan tahan panas, komponen pembangkit nuklir, keramik

Dari 23 unsur mineral diatas, sesuai hasil kesepakatan Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta perwakilan Industri Pertahanan (PT. Pindad dan PT. Dahana), disepakati 9 mineral strategis berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Mineral tersebut merupakan unsur (komposisi) utama untuk komponen alat utama sistem persejataan. Artinya bahwa unsur/komposisi yang terkandung menjadikan materiil Alutsista unggul secara sifat fisika dan kimia (smart materiil) dan unggul dalam fungsi/peran alat peralatan pertahanan, tidak berdasarkan presentase komposisi kandungan tertinggi.
- b) Adanya Ketersediaan mineral dalam jangka panjang. Artinya bahwa ketersediaan (cadangan) sumber dayanya yang sudah teridentifikasi secara nasional dimungkinkan hingga jangka panjang. Pasokan dan keterdapatannya serta karakteristik sumberdaya mineralnya, bersifat mineral utama, mineral ikutan (*by-product*), unsur ikutan (*co-product*) serta kelimpahannya (kadar).
- c) Memiliki tingkat urgensi kebutuhan industri pertahanan. Artinya bahwa kebutuhan atas mineral dimaksud sangat tinggi untuk pembuatan Alat peralatan pertahanan, sehingga menjadi kebutuhan primer/vital dan mutlak perlu dikuasai.
- d) Adanya peluang terhadap penguasaan teknologi pengolahan nasional, dan partisipasi industri nasional, sebagai rantai pasok industri nasional. Artinya bahwa tingkat penguasaan industri pemrosesan telah tersedia seiring perkembangan di dalam negeri untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada pihak luar negeri, mulai dari teknologi untuk penambangan dan

pengolahan mineral, pemrosesan mineral (ekstraksi dan pemurnian), dan pemrosesan materiil intermediate produk dan/atau materiil komponen Alutsista (*supply chain* dari mineral ke materiil komponen Alutsista).

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka mineral yang strategis untuk mendukung pertahanan terdiri dari :

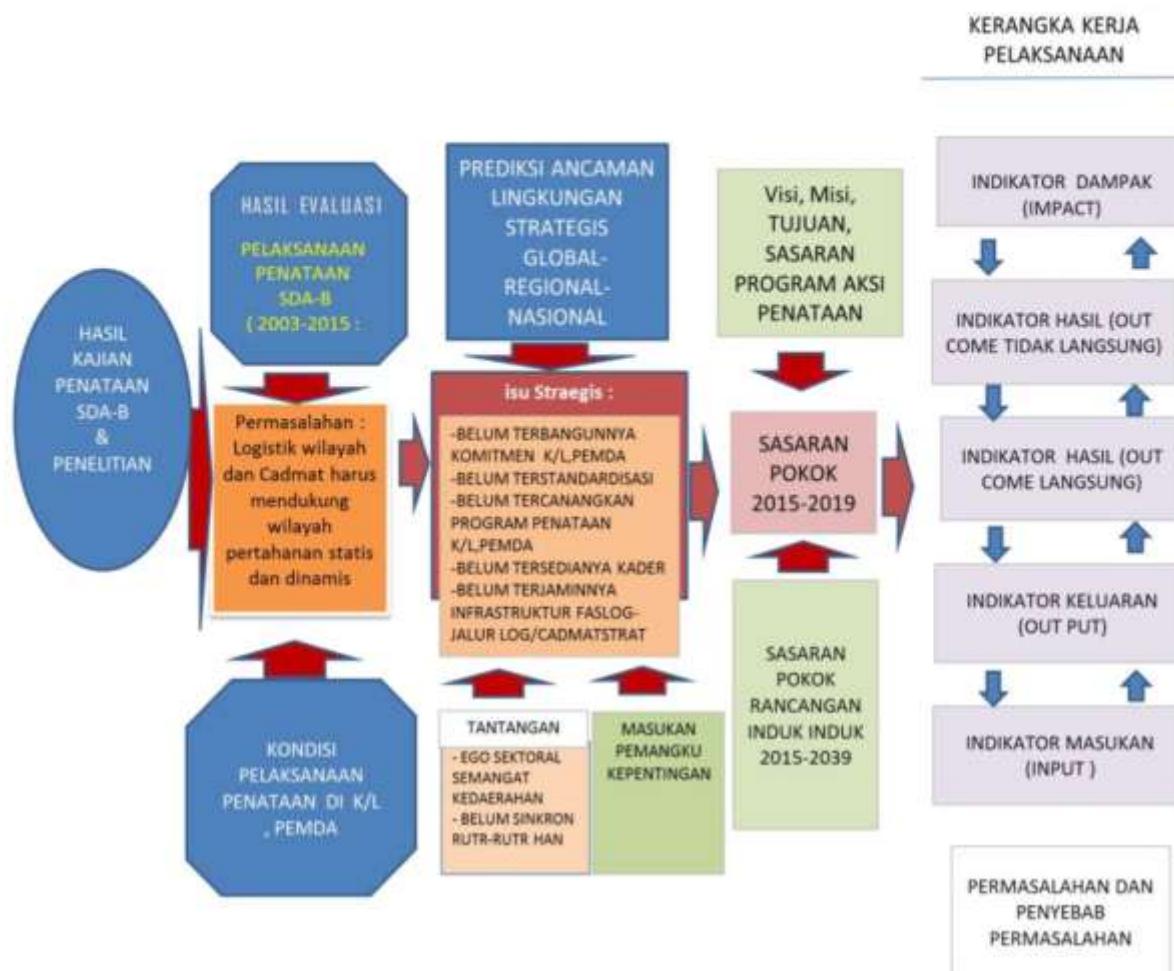
No.	Unsur	Keterkaitan indikator
1	2	3
1	Chromium (Cr)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur penentu materiil baja menjadi tahan karat (baja tahan karat) ▪ Materiil Alutsista kebutuhan industri pertahanan berbasis baja tahan karat ▪ Sumberdaya mineral pembawa unsur chromium Indonesia terbatas sebagai mineral chromite. ▪ Rantai pasok industri nasional dalam bentuk <i>ferro-chrom</i>, namun belum terbangun industri baja tahan karat nasional.
2	Manganese (Mn)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur paduan untuk meningkat kekuatan materiil (baja tahan karat). ▪ Materiil Alutsista kebutuhan industri pertahanan berbasis baja tahan karat dengan komposisi unsur paduan logam Mn. ▪ Sumberdaya mineral pembawa unsur mangan Indonesia terbatas sebagai mineral pyrolusite. ▪ Rantai pasok industri nasional dalam bentuk ferro-mangan dan manganese oxide/ manganese dioxide, belum terbangun industri baja tahan karat nasional
3	Molybdenum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur paduan untuk meningkat

	(Mo)	<p>kekuatan materiil (baja tahan karat) dengan struktur austenitic.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Materiil Alutsista kebutuhan industri pertahanan berbasis baja tahan karat dengan komposisi unsur paduan logam Mo. ▪ Sumberdaya mineral pembawa unsur molybdenum Indonesia terbatas sebagai mineral molybdenite. ▪ Rantai pasok industri nasional belum tersedia.
4	Nickel (Ni)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur penentu materiil baja menjadi tahan karat (baja tahan karat) dengan karakteristik tinggi dan logam dasar superalloy (Nickel-based alloy). <p>Materiil Alutsista kebutuhan industri pertahanan berbasis baja tahan karat dengan komposisi unsur paduan logam Ni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumberdaya mineral lateritic nickel Indonesia dengan pontesi kedua terbesar dunia (melimpah). ▪ Rantai pasok industri nasional dalam bentuk ferro-nickel (Fe-Ni), nickel pigiron (NPI) dan nickel matte, namun belum terbangun industri baja tahan karat nasional dan tidak dihasilkan produk logam murni nickel yang dimungkinkan dari nickel matte di dalam negeri.
5	Stibium (Sb)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur penentu yang digunakan materiil amunisi, detonator peluru. ▪ Materiil Alutsista kebutuhan industri pertahanan ▪ Sumberdaya mineral pembawa unsur antimony/stibium Indonesia terbatas

		<p>sebagai mineral stibnite.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rantai pasok industri nasional belum tersedia.
6	Titanium (Ti)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur penentu materiil penggunaan pada kondisi suhu tinggi, terutama materiil komponen pesawat tempur. ▪ Materiil Alutsista kebutuhan industri pertahanan. ▪ Sumberdaya mineral bijih besi dan mineral berat Indonesia dengan pontesi kedua terbesar dunia (melimpah) untuk deposit pasir besi jenis titanomagnetite. ▪ Rantai pasok industri nasional belum tersedia
7	Vanadium (V)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur penentu materiil baja tahan karat dengan karakteristik tertentu, terutama materiil senjata laras panjang. ▪ Materiil Alutsista kebutuhan industri pertahanan berbasis baja tahan karat dengan komposisi unsur paduan logam V. ▪ Sumberdaya mineral bijih besi Indonesia dengan pontesi kedua terbesar dunia (melimpah) untuk deposit pasir besi jenis titanomagnetite. ▪ Rantai pasok industri nasional belum tersedia.
8	Cobalt (Co)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur penentu materiil baja tahan karat dengan karakteristik tertentu dan logam dasar materiil superalloy(cobalt-based alloys). ▪ Materiil Alutsista kebutuhan industri pertahanan berbasis baja tahan karat dengan komposisi unsur paduan logam Co. ▪ Sumberdaya mineral lateritic nickel

		<p>Indonesia sebagai unsur ikutan dengan potensi kedua terbesar dunia (melimpah).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rantai pasok industri nasional belum tersedia.
9	Logam Tanah Jarang (Rare Earth Elements-REE)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur paduan yang sangat penting pada materiil maju, terutama pada Alutsista modern dengan materiil spesial (<i>advanced materials</i>). ▪ Materiil Terfenol-D, paduan tiga logam; Terbium (Te), Iron (Fe), dan Dysprosium (Dy), materiil peredam gelombang sonar,) materiil optik teropong bidik senapan malam (TBSM)-Yttrium aluminium garnet (Y₃Al₅O₁₂) (YAG). ▪ Sumberdaya mineral pembawa unsur LTJ Indonesia terbatas sebagai mineral monazite-xenotime, dikategorikan mineral ikutan dalam deposit bijih timah dan deposit zircon-ilmenite. ▪ Rantai pasok industri nasional belum tersedia.

24. Alur Perumusan Arah Kebijakan Penataan Logistik Wilayah dan Cadangan Materiil Strategis 2015-2019



25. Sasaran Pokok 2015 – 2019.

- Roadmap* 2015 – 2019 disusun untuk mencapai sasaran lima tahun pertama yang telah dicanangkan dalam rencana induk Penataan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, yaitu : **Penataan** mencakup konsolidasi, koordinasi, sinergi dan integrasi pelaksanaan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di antara Kementerian/lembaga Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah serta Komponen bangsa lainnya, yang diwujudkan dalam upaya pembentukan Sistem penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang terpadu dan bersinergi, serta pedoman penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang komprehensif dan implementatif, yang menyatukan langkah para pemangku kepentingan.

- b. Indikator hasil (*outcome*) yang ingin dicapai di tahun 2015, sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Pedoman Penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang komprehensif dan implementatif.
 - 2) Terwujudnya perangkat kebijakan terpadu untuk mendukung penyelenggaraan penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, tahap 1
 - 3) Terumuskan sumber daya mineral dan cadangan materiil yang bersifat strategis bagi kepentingan pertahanan negara.
 - 4) Terwujudnya penyelenggaraan penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis terpadu yang melibatkan SDM, Infrastruktur dan unsur pendukung lainnya untuk meningkatkan penyebarluasan pemberdayaan wilayah di daerah sasaran, tahap 1.
 - 5) Terbentuknya kader pemberdayaan wilayah khususnya dalam bidang penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dengan target 3.249 orang, yang berperan sebagai *agent of change*, yang mampu menyebarluaskan pentingnya penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis , tahap 1.
 - 6) Terwujudnya keterlibatan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam upaya menyebarkan pentingnya sumber daya alam dan buatan guna mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah sasaran di seluruh Indonesia, tahap 1.
 - 7) Terwujudnya penyelenggaraan penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang berskala nasional, tahap 1.

- 8) Terbentuknya dan terbinanya masyarakat dalam menata sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah sasaran tahap 1.
 - 9) Terdatanya infrastruktur fasilitas logistik dan jalur distribusi logistik disetiap wilayah pertahanan yang terakses instalansi TNI melalui mekanisme komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I) Tahap 1.
- c. Indikator hasil (*outcome*) yang ingin dicapai di tahun 2016 sebagai berikut:
- 1) Hasil evaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan di tahap 1, yang akan digunakan sebagai dasar pengayaan bentuk kegiatan-kegiatan di tahap 2.
 - 2) Terwujudnya perangkat kebijakan terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Penataan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, tahap 2
 - 3) Terumuskan sumber daya mineral dan cadangan materiil yang bersifat strategis bagi kepentingan pertahanan negara.
 - 4) Terwujudnya penyelenggaraan Penataan SDA/B terpadu yang melibatkan SDM, Infrastruktur dan unsur pendukung lainnya untuk meningkatkan penyebar-luasan pemberdayaan wilayah di daerah sasaran, tahap 2
 - 5) Terbentuknya kader pemberdayaan wilayah khususnya dalam bidang penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dengan target 3.249 orang, yang berperan sebagai *agent of change*, yang mampu menyebarluaskan pentingnya penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis , tahap 2.
 - 6) Terwujudnya keterlibatan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam upaya menyebarkan pentingnya sumber daya alam dan buatan guna mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah sasaran di seluruh Indonesia, tahap 2.

- 7) Terwujudnya penyelenggaraan Penataan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang berskala nasional, tahap 2
- 8) Terbentuknya dan terbinanya masyarakat dalam mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil startegis di daerah sasaran tahap 2
- 9) Terdatanya infrastruktur fasilitas logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah pertahanan yang terakses ke instalasi TNI melalui mekanisme komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I) Tahap 2.

d. Indikator hasil (*outcome*) tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi berbagai kegiatan Penataan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang dilakukan di tahap 2, yang akan digunakan sebagai dasar pengayaan bentuk kegiatan-kegiatan di tahap 3.
- 2) Terwujudnya sinergi dan integritas kegiatan Penataan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang terpadu di lintas kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, tahap 1.
- 3) Terumuskan sumber daya mineral dan cadangan materiil yang bersifat strategis bagi kepentingan pertahanan negara.
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan terpadu yang melibatkan SDM, Infrastruktur dan unsur pendukung lainnya untuk meningkatkan penyebarluasan penataan sumber daya alam dan buatan di daerah sasaran, tahap 3
- 5) Terbentuknya kader pemberdayaan wilayah khususnya dalam bidang penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dengan target 3.249 orang, yang berperan sebagai *agent of change*, yang mampu menyebarluaskan pentingnya penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis ,tahap 3.

- 6) Terwujudnya keterlibatan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam upaya menyebarkan pentingnya sumber daya alam dan buatan guna mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah sasaran di seluruh Indonesia, tahap 3.
 - 7) Terwujudnya penyelenggaraan Penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang berskala nasional, tahap 3.
 - 8) Terbentuknya dan terbinanya masyarakat dalam mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah sasaran tahap 3.
 - 9) Terdatanya infrastruktur fasilitas logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah pertahanan yang terakses instalasi TNI melalui mekanisme komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I) Tahap 3.
- e. Indikator hasil (*outcome*) tahun 2018 sebagai berikut:
- 1) Hasil evaluasi berbagai kegiatan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang dilakukan di tahap 3, yang akan digunakan sebagai dasar pengayaan bentuk kegiatan-kegiatan di tahap 4.
 - 2) Terwujudnya sinergi dan integritas kegiatan Pentaan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis yang terpadu di lintas kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah tahap 2.
 - 3) Terwujudnya penyelenggaraan terpadu yang melibatkan SDM, Infrastruktur dan unsur pendukung lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah sasaran tahap 4.
 - 4) Terumuskan sumber daya mineral dan cadangan materiil yang bersifat strategis bagi kepentingan pertahanan negara.
 - 5) Terbentuknya kader pemberdayaan wilayah khususnya dalam bidang penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dengan target 3.249

orang, yang berperan sebagai *agent of change*, yang mampu menyebarluaskan pentingnya penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, di daerah Sasaran tahap 4.

- 6) Terwujudnya keterlibatan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam upaya menyebarkan pentingnya sumber daya alam dan buatan guna mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah Sasaran di seluruh Indonesia tahap 4.
- 7) Terwujudnya penyelenggaraan Penataan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang berskala nasional tahap 4.
- 8) Terbentuknya dan terbinanya masyarakat dalam mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah Sasaran tahap 4.
- 9) Terdatanya infrastruktur fasilitas logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah pertahanan yang terakses instalasi TNI melalui mekanisme komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I) Tahap 4.

f. Indikator hasil (*outcome*) tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi berbagai kegiatan Penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang dilakukan di tahap 4, yang akan digunakan sebagai dasar pengayaan bentuk kegiatan-kegiatan di tahap 5.
- 2) Terwujudnya sinergi dan integritas kegiatan Penataan sumber daya alam dan buatan untuk logistik wilayah dan cadangan materiil dan strategis yang terpadu lintas Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tahap 3
- 3) Terumuskan sumber daya mineral dan cadangan materiil yang bersifat strategis bagi kepentingan pertahanan negara.
- 4) Terwujudnya penyelenggaraan terpadu yang melibatkan SDM, Infrastruktur dan unsur pendukung

lainnya untuk meningkatkan penataan sumber daya alam dan buatan di daerah sasaran, tahap 5.

- 5) Terbentuknya kader pemberdayaan wilayah khususnya dalam bidang penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis dengan target 3.249 orang, yang berperan sebagai *agent of change*, yang mampu menyebarluaskan pentingnya penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, di daerah sasaran tahap 5.
- 6) Terwujudnya keterlibatan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam upaya menyebarkan pentingnya sumber daya alam dan buatan guna mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah sasaran di seluruh Indonesia tahap 5.
- 7) Terwujudnya penyelenggaraan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis yang berskala nasional tahap 5.
- 8) Terbentuknya dan terbinanya masyarakat dalam mewujudkan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis di daerah sasaran tahap 5.
- 9) Terdatanya infrastruktur fasilitas logistik dan jalur distribusi logistik disetiap komando wilayah pertahanan yang terakses instalansi TNI melalui mekanisme komando, kontrol, komunikasi, dan informasi (K3I) Tahap 5.

BAB 7

PENUTUP

26. **Kandungan Rancangan Induk.** Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015 – 2039, berisi latar belakang pentingnya penyusunan Rancangan Induk, kerangka dasar penataan logistik wilayah dan cadangan materiil startegis yang meliputi antara lain isu-isu strategis, arah kebijakan, dan strategi implementasi penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis.
27. **Rancangan Induk Sebagai Pedoman.** Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan logistik wilayah dan cadangan materiil strategis, guna membangun kesepahaman agar terwujudnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan tindakan, agar pelaksanaan penataan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan sasaran yang ditetapkan secara nasional selama periode dua puluh lima tahun mendatang. Dengan adanya Rancangan Induk ini diharapkan penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis untuk komponen pendukung pertahanan negara dapat tersusun secara sistematis, dan berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan komponen pendukung pertahanan negara.
28. **Penataan Logistik.** Penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis komponen pendukung pertahanan negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, guna menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
29. **Keberhasilan.** Keberhasilan penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis untuk komponen pendukung pertahanan negara, memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, juga

konsistensi, keterpaduan dan kesinambungan sistem pelaksanaan penataan melalui koordinasi dan sinergi, sehingga dapat dilakukan secara sistematis, efisien dan efektif.

Demikian "Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Dan Buatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara 2015-2039" dibuat untuk dijadikan pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam rangka penataan sumber daya alam dan buatan komponen pendukung pertahanan negara. Hal-hal yang dipandang perlu dan belum terakomodir dalam naskah ini akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2016



Tabel
Matriks Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan Sebagai Logistik Wilayah dan Cadangan Materiil Strategis Komponen Pendukung Pertahanan Negara

NO	Logistik Wilayah	Potensi Logistik Wilayah	Manfaat	Objek Logistik Wilayah
1	2	3	4	5
1	Pertanian	Hasil Pertanian		
a		Padi	bahan pangan	Kelas I
b		Jagung	bahan pangan	Kelas I
c		Ubi Kayu	Bahan pangan	Kelas I
d		Ubi Jalar	bahan pangan	Kelas I
e		Sayur-sayuran	Bahan pangan	Kelas I
f		Kacang-kacangan	bahan pangan	Kelas I
2	Perkebunan	Hasil Perkebunan		
a		Kopi	Bahan penyedap	Kelas I
b		Teh	Bahan minuman	Kelas I
c		Kelapa	Bahan pangan, bahan dasar pembuat minyak kelapa	Kelas I
d		Kelapa Sawit	Energi terbarukan	Kelas III
e		Kakao	Bahan dasar Coklat	Kelas I
f		Tembakau	Bahan dasar rokok	Kelas I
g		Karet	Bahan dasar Ban	Kelas I
h		Cengkeh	Bahan Dasar rokok, minyak	Kelas I
j		Tebu	Bahan Dasar Gula	Kelas I
k		Kapas	Bahan dasar Pakaian	Kelas II
l		Jarak	Energi terbarukan	Kelas III
3	Hortikultura	Hasil Budi Daya	Sumber bahan	

		Tanaman	pangan	
a		Pepaya	bahan pangan	Kelas I
b		Pisang	bahan pangan	Kelas I
c		Jeruk	bahan pangan	Kelas I
d		Kentang	bahan pangan	Kelas I
e		Sayur-sayuran	bahan pangan	Kelas I
f		Kacang-kacangan	bahan pangan	Kelas I
4	Kehutanan	Hasil Hutan		
a		Sagu	Bahan pangan	Kelas I
b		Kayu	Bahan bangunan	Kelas IV
c		Rotan	Bahan Furnitur	Kelas IV
d		Kayu Bakar	Bahan Bakar Tradisional	Kelas III
5	Peternakan			
a		Sapi	Alat transportasi, Alat pertanian, bahan pangan	Kelas I, Kelas IV
b		Kerbau	alat transportasi, alat pertanian, bahan pangan pertanian	Kelas I, Kelas IV
c		Kambing	bahan pangan	Kelas I
d		Domba	bahan pangan, pakaian	Kelas I, Kelas IV
e		Unggas	bahan pangan, alat komunikasi	
1)		Merpati	alat komunikasi, bahan pangan	Kelas IV, Kelas I
2)		Ayam	bahan pangan	Kelas I
3)		Bebek		Kelas I
6	Perikanan			
a		Ikan Kolam	bahan pangan	Kelas I
b		Ikan Sawah	bahan pangan	Kelas I
c		Ikan Keramba	bahan pangan	Kelas I
d		Ikan Laut	bahan pangan	Kelas I
e		Perikanan Jaring	bahan pangan	Kelas I
f		Ikan Tambak	bahan pangan	Kelas I
g		Perikanan Tangkap	bahan pangan	Kelas I

7	Perindustrian			
a		Industri Makanan		Kelas I
1)		Mie Instan		Kelas I
2)		Roti		Kelas I
3)		Minyak Goreng		Kelas I
4)		Gula		Kelas I
5)		Garam		Kelas I
6)		Makanan Kaleng		Kelas I
b		Industri Penyulingan Minyak dan Gas		Kelas III
1)		Minyak Tanah		Kelas III
2)		Premium		Kelas III
3)		Solar		Kelas III
4)		Liquid Petroleum Gas (LPG)		Kelas III
5)		Minyak Pelumas		Kelas III
c		Hasil Industri Materiil		Kelas IV
1)		Perlengkapan Perorangan		Kelas II
2)		Perlengkapan Satuan		Kelas II
3)		Alat-alat Dapur		Kelas IV
4)		Toolkit/Peralatan ringan Untuk Pertukungan dan Perbengkelan		Kelas IV
5)		Alat-alat tulis		Kelas IV
6)		Suku Cadang Kendaraan		Kelas IV
7)		Batu Baterai		Kelas IV
d		Hasil Industri Obat-obatan dan Peralatan Medis		Kelas IV
1)		Obat-obatan		Kelas IV
2)		Peralatan Medis		Kelas IV
II	Cadangan Materil Strategis			
1		Potensi Cadangan	Manfaat	Objek

		Materil Strategis		Cadangan Materil Strategis
a		Sumber Daya Alam		
1)		Hasil Pertambangan		
a)		Mineral logam		
(1)		Mineral Logam Dasar		
(a)		Timbal	bahan penggalak peluru	bahan penggalak peluru
(b)		Tembaga	Bahan baku Alutsista	Bahan baku Alutsista
(c)		Timah	Bahan laras senjata AK 47 dan Amunisi	Bahan laras senjata AK 47 dan Amunisi
(d)		Air Raksa	Alat kesehatan dan Kompas	Alat kesehatan dan Kompas
(e)		Seng	bahan peluru dan bahan campuran	bahan peluru dan bahan campuran
(2)		Mineral Logam Mulia		
(a)		Emas	bahan pelapis	bahan pelapis
(b)		Perak	bahan pelapis	bahan pelapis
(c)		Platina	bahan pelapis	
(3)		Mineral Logam Besi dan Paduan Besi		
(a)		Besi	bahan baku laras senjata	bahan baku laras senjata
(b)		Mangan	Bahan paduan (alloy)	Bahan paduan (alloy)
(c)		Kromit	bahan pelapis	bahan pelapis
(d)		Kobalt	bahan paduan	bahan paduan
(e)		Titanium	bahan komposit plate peralatan pertahanan	bahan komposit plate peralatan pertahanan
(f)		Molibdenum	bahan paduan	bahan

			laras senjata SS1	paduan laras senjata SS1
(g)		Nikel		
(h)		Wolfram	Bahan paduan (alloy) Alutsista	Bahan paduan (alloy) Alutsista
(J)		Aluminium	bahan alat utama	bahan alat utama
(4)		Mineral Logam Ringan dan Langka	bahan baku nuklir	bahan baku nuklir
(a)		Bauksit	bahan baku komponen alat utama	bahan baku komponen alat utama
(b)		Monosit	bahan baku komponen alat utama (pesawat terbang)	
b)		Mineral Non Logam		
(1)		Bitumen Cair	pembuatan jalan	pembuatan jalan
(2)		Bitumen Padat	pembuatan jalan	pembuatan jalan
(3)		Aspal	pembuatan jalan	pembuatan jalan
(4)		Antrasit	Jenis tubara keras terutama digunakan dalam pembangkit listrik tenaga	Jenis tubara keras terutama digunakan dalam pembangkit listrik tenaga
(5)		Uranium	bahan baku nuklir	bahan baku nuklir
(6)		Radium	bahan baku nuklir	bahan baku nuklir
(7)		Thorium	bahan baku nuklir	bahan baku nuklir
(8)		Vanadium	Bahan baku paduan	Bahan baku paduan
(9)		Arsenit	Bahan baku produk kesehatan non	Bahan baku produk kesehatan

			obat dan alat kesehatan	non obat dan alat kesehatan
b		Sumber Daya Buatan		
1)		Hasil Pertambangan		
a)		Nonmineral :		
(1)		Batubara Cair	bahan baku alternatif alat transportasi	bahan baku alternatif alat transportasi
(2)		Phospor	bahan baku bahan peledak	bahan baku bahan peledak
(3)		Nitrogen	bahan baku bahan peledak	bahan baku bahan peledak
(4)		Sulfur	Bahan reaksi (dissolving agent) pembuatan Nitroselulosa	Bahan reaksi (dissolving agent) pembuatan Nitroselulosa
2)		Hasil Pengolahan Bahan Tambang		
a)		Paduan Logam		
(1)		Kuningan	bahan baku amunisi	bahan baku amunisi
(2)		Alloy	Bahan baku alat utama	Bahan baku alat utama
b)		Baja	bahan baku alat utama	bahan baku alat utama
c)		Batubara cair	Bahan bakar alternative dan bahan bakar untuk alat transportasi	Bahan bakar alternative dan bahan bakar untuk alat transportasi
3)		Minyak Bumi : hasil Pengilangan Minyak Bumi		
(1)		Avtur	bahan bakar pesawat terbang	bahan bakar pesawat terbang
(2)		Premium	bahan bakar sarana	bahan bakar sarana

			transportasi	transportasi
(3)		Solar	bahan bakar sarana transportasi dan kendaraan tempur	bahan bakar sarana transportasi dan kendaraan tempur
(4)		Minyak Pelumas	Pelumas mesin alat utama dan transportasi	Pelumas mesin alat utama dan transportasi
(5)		Minyak Tanah		
(6)		Minyak Pelumas		
(7)		Minyak Tanah		
(8)		Minyak Bakar		
(9)		Minyak Diesel		
(10)		Avgas		
c)		Gas Alam : Hasil Pengolahan Gas Alam	bahan bakar alternatif alat transportasi	bahan bakar alternatif alat transporatsi
(1)		Gas bumi yang dicairkan : LNG)	bahan bakar alternatif alat transportasi	bahan bakar alternatif alat transportasi
(2)		Gas Hidrokarbon yang dicairkan : LPG	bahan bakar alternatif alat transporatsi	bahan bakar alternatif alat transporatsi
d)		Hasil Petrokimia		
(1)		Hasil Lanjutan dari Pengolahan Minyak dan Gas		
(a)		Nafta		
(b)		Benzena		
(c)		Toluena		
(d)		Ksilene		
(e)		Propilena	bahan peledak kuat	bekal kelas v
(f)		Metanol	merupakan <u>bahan bakar terbaharu</u> yang dapat menggantikan hidrokarbon.	Bekal Kelas III
(g)		Amonia	membuat hidrazin (N ₂ H ₄)sebagai	Bekal Kelas V

			bahan bakar roket, bahan dasar pembuatan bahan peledak	
(h)		Paraksilena		
(j)		Asam Terefalat Murni	sebagai komponen untuk sintesis - organik kerangka logam .	sebagai komponen untuk sintesis - organik kerangka logam
2)		Alat Peralatan Hasil Industri		
a)		Suku Cadang	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(1)		Peralatan Zeni	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(2)		Peralatan komunikasi	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(3)		Peralatan Kesehatan	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(4)		Peralatan Kendaraan Bermotor	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(5)		Peralatan Pesawat Terbang	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(6)		Peralatan Angkutan Air	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(7)		Peralatan Senjata dan munisi	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(8)		Peralatan Optik	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan
(9)		Peralatan Topografi dan Navigasi	mendukung peralatan pertahanan	mendukung peralatan pertahanan

e)		Alat Peralatan Hasil Industri Pertahanan		
(1)		Alat Peralatan penghasil energi yang menggunakan potensi sumber daya alam	merupakan sumber <u>bahan bakar terbaharukan</u> yang dapat mengantikan energy fosil	Bekal Kelas III
(a)		Peralatan energi listrik tenaga matahari	idem	Bekal Kelas III
(b)		Peralatan energi listrik tenaga air	idem	Bekal Kelas III
(c)		Peralatan energi listrik tenaga mikro hidro	idem	Bekal Kelas III
(d)		Peralatan energi listrik tenaga panas bumi	idem	Bekal Kelas III
(e)		Peralatan energi listrik tenaga angin	idem	Bekal Kelas III

Lampiran 2

MATRIK TARGET KINERJA RANCANGAN INDUK PENATAAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA 2015 - 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	BASELINE NE (2014)	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
						2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Kelembagaan	Terwujudnya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) para pemangku kepentingan (stakeholders), antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan kementerian/lembaga (KL) terkait dan Pemerintah Daerah (Pemda), tentang penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara.	Kesepakatan Bersama tentang Penataan SDAB sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara antara Kemhan, TNI dengan KL dan Pemda yang tersepakati	Jumlah Kesepakatan Bersama tentang Penataan SDAB sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara antara Kemhan, TNI dengan KL dan Pemda yang tersepakati							
1	Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerjasama (PKS) para pemangku kepentingan (stakeholders), antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan kementerian/lembaga (KL) terkait dan Pemerintah Daerah (Pemda), tentang penataan sumber daya alam dan buatan sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara.	a. Perjanjian Kerjasama tentang Penataan SDAB sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara antara Kemhan, TNI dengan KL dan Pemda.	Jumlah Perjanjian Kerjasama tentang Penataan SDAB sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara antara Kemhan, TNI dengan KL dan Pemda yang tersepakati	Jumlah Perjanjian Kerjasama tentang Penataan SDAB sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara antara Kemhan, TNI dengan KL dan Pemda yang tersepakati	0	0	0	0	5	Kemhan, TNI dengan Pemprov	
		b. Perjanjian Kerjasama tentang Penataan SDAB sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara antara Kemhan, TNI dengan KL dan Pemda.	Jumlah Perjanjian Kerjasama tentang Penataan SDAB sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara antara Kemhan, TNI dengan KL dan Pemda yang tersepakati	Jumlah Perjanjian Kerjasama tentang Penataan SDAB sebagai logistik wilayah dan cadangan materil strategis komponen pendukung pertahanan negara antara Kemhan, TNI dengan KL dan Pemda yang tersepakati	0	0	0	0	15	Kemhan, TNI dengan Pemkab/Pemkot	
2	MoU dan Perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber daya alam dan buatan untuk Hanmeg	Tersusunnya Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan Keterdapatan Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, BPPT, dan BATAN	Dokumen Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan Keterdapatan Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, BPPT, dan BATAN	Jumlah Dokumen Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan Keterdapatan Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, BPPT, dan BATAN							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	Tersusunnya Perjanjian Kerjasama tentang Penelitian dan Pengembangan Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, BPPT dan BATAN	Dokumen Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, BPPT dan BATAN	Jumlah Dokumen Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, BPPT, dan BATAN	0	0	0	1			
2	3	Tersusunnya Kesepakatan Bersama tentang pengelolaan dan pemurnian Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, dengan Kementerian Perindustrian	Dokumen Kesepakatan Bersama tentang pengelolaan dan pemurnian Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, dengan Kementerian Perindustrian	Jumlah Dokumen Kesepakatan Bersama tentang pengelolaan dan pemurnian Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, dengan Kementerian Perindustrian	1						
2	3	Tersusunnya Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, dengan Kementerian Perindustrian	Dokumen Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, dengan Kementerian Perindustrian	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, dengan Kementerian Perindustri	1						
2	3	Tersusunnya Perjanjian Kerjasama tentang Peninjauan dan Sertifikasi Industri berbasis berbasis Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM dan Kementerian Perindustrian	Dokumen Perjanjian Kerjasama tentang Peninjauan dan Sertifikasi Industri berbasis Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, dan Kementerian Perindustrian	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama tentang Peninjauan dan Sertifikasi Industri berbasis Mineral Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara antara Kemhan, Kem ESDM, dan Kementerian Perindustrian	1						
3	3	Program Sosialisasi Rancangan Induk Penataan SDA/B Komponen Pendukung Pertahanan Negara	Tersosialisasinya Rancangan Induk Penataan SDA/B Komponen Pendukung Pertahanan Negara di setiap Wilayah Pertahanan	Aparatur territorial dan pejabat Denda yang memahami Rancangan Induk Penataan SDA/B Komponen Pendukung Pertahanan Negara	0	0	0	0	2000	2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penataan dan Pembinaan Logistik wilayah untuk Komodik Hama neg	Terwujudnya program pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara lain dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua).	Jenis dan Luas Lahan tanaman pangan sebagai persediaan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	Jenis dan Luas Lahan tanaman pangan sebagai persediaan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	Jenis dan Luas Lahan tanaman pangan sebagai persediaan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	Jenis dan Luas Lahan tanaman pangan sebagai persediaan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	Jenis dan Luas Lahan tanaman pangan sebagai persediaan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	Jenis dan Luas Lahan tanaman pangan sebagai persediaan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	Jenis dan Luas Lahan tanaman pangan sebagai persediaan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	Jenis dan Luas Lahan tanaman pangan sebagai persediaan logistik di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.	Kembaran dengan KIL dan Pemda	
4												
5	Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pembinaan Logistik wilayah untuk Komodik Hama neg	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pilot proyek penanaman bibit tanaman pangan dan pendukungnya dalam rangka penyajian logistik di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara lain di Prov. NTT (Kab. Alambua)	
6												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penelitian sumber daya mineral strategis yang dapat dikembangkan menjadi industri strategis berbasis mineral untuk advance technology dan Autista teknology dan Autista	Mendapatkan sumber daya mineral strategis yang dapat dikembangkan menjadi industri strategis berbasis mineral untuk advance technology dan Autista di setiap wilayah Kompartemen strategis	Jenis sumber daya mineral strategis yang dapat dikembangkan menjadi industri strategis berbasis mineral untuk advance technology dan Autista di setiap wilayah Kompartemen strategis	Jenis sumber daya mineral strategis yang dapat dikembangkan menjadi industri strategis berbasis mineral untuk advance technology dan Autista di setiap wilayah Kompartemen strategis	0	0	1	1	1	1	Balibang Kemhan, BPPT, ESDM, LIPI, dan BATAN
2	Raker Rancangan Induk Penataan SDAB Komduk untuk Kepentingan Hanneg 7	Terkoordinasinya Rancangan Induk Penataan SDAB Komduk untuk Kepentingan Hanneg di wilayah Prov. Subbar dan Kalimantan	Terkoordinasinya Rancangan Induk Penataan SDAB Komduk untuk Kepentingan Hanneg di wilayah Prov. Subbar dan Kalimantan	Terkoordinasinya Rancangan Induk Penataan SDAB Komduk untuk Kepentingan Hanneg di wilayah Prov. Subbar dan Kalimantan	Persetase Terkoordinasinya Rancangan Induk Penataan SDAB Komduk untuk Kepentingan Hanneg di wilayah Prov. Subbar dan Kalimantan	0	0	0	0	1	
3					Persetase Terkoordinasinya Rancangan Induk Penataan SDAB Komduk untuk Kepentingan Hanneg di wilayah Prov. Subbar dan Kalimantan	0	0	0	0	1	
4						0	0	0	0	1	
5							0	0	0	1	
6								0	0	1	
7									0	1	
8	Inventarisasi i Keterdapatatan Mineral Strategis untuk Komduk Hanneg	Terinventarisasi Keterdapatatan Mineral Strategis untuk Komduk Hanneg di Babel, Ketapang dan Mahakam	Jumlah dan Jenis Mineral Strategis yang terinventarisasi di Babel, Ketapang dan Mahakam	Jumlah dan Jenis Mineral Strategis yang terinventarisasi di Babel, Ketapang dan Mahakam	Jumlah dan Jenis Mineral Strategis yang terinventarisasi di Babel, Ketapang dan Mahakam	0	0	0	3		
9	Penetapan Kebijakan Mineral Strategis untuk Komduk Hanneg (Permenhan)	Terinventarisasi Keterdapatatan Mineral Strategis untuk Komduk Hanneg di Pulau Singkep (Kepri), Sultra	Jumlah dan Jenis Mineral Strategis yang terinventarisasi di Pulau Singkep (Kepri), Sultra	Jumlah dan Jenis Mineral Strategis yang terinventarisasi di Pulau Singkep (Kepri), Sultra	Jumlah dan Jenis Mineral Strategis yang terinventarisasi di Pulau Singkep (Kepri), Sultra	0	0	0	0	2	
10	Kebijakan tentang Penataan dan Pembinaan SDAB sebagai Logwil dan Cadmaistrat	Tersusunnya Kebijakan Mineral Strategis untuk Komduk Hanneg (Permenhan)	Tersusunnya Kebijakan Mineral Strategis untuk Komduk Hanneg (Permenhan)	Jumlah Kebijakan Mineral Strategis untuk Komduk Hanneg (Permenhan)	Jumlah Draft PP tentang Penataan dan Pembinaan SDAB Komduk Hanneg	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Program Pendataan dan penganalisaan Logwil dan Cadmatsrat	Terkumpulnya data tentang jumlah kebutuhan bekal kelas I s.d Kelas V satuan TNI disetiap Kompartimen strategis, pola distribusi, fasilitas logistik dan jalur logistik	Tersusunnya Data base bekal kelas I s.d Kelas V satuan TNI disetiap Kompartimen strategis, pola distribusi, fasilitas logistik dan jalur logistik	Data base bekal kelas I s.d Kelas V satuan TNI disetiap Kompartimen strategis, pola distribusi, fasilitas logistik dan jalur logistik	0	0	0	4	4	4	Kemhan, TN berkoordinasi dengan BPS
	B Standardisasi, Norma, Kriteria Sumber Daya Alam dan Buatan										
1	Penyusunan Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah	Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah	0	1	0	0	0	0	
		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas I	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas I	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas I	0	0	0	0	0	1	
		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas II	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas II	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas II	0	0	0	0	0	1	
		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas III	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas III	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas III	0	0	0	0	0	1	
		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas IV	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas IV	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas IV	0	0	0	0	0	1	
		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas V	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas V	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Logistik Wilayah Bekal Klas V	0	0	0	0	0	1	
2	Penyusunan Pedoman Jalur Logistik Wilayah pertahanan negara	Tersusunnya Buku Pedoman tentang Jaur Logistik Wilayah untuk Pertahanan Negara	Jumlah Buku Pedoman tentang Jaur Logistik Wilayah untuk Pertahanan Negara	Jumlah Buku Pedoman tentang Jaur Logistik Wilayah untuk Pertahanan Negara	0	0	0	0	0	1	
3	Kajian dan Litbang sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I s.d Kelas V	a. Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	0	0	0	0	0	1	Balitbang Kemhan, KKP BPPT, ESDM, LIPI, Petrokimia

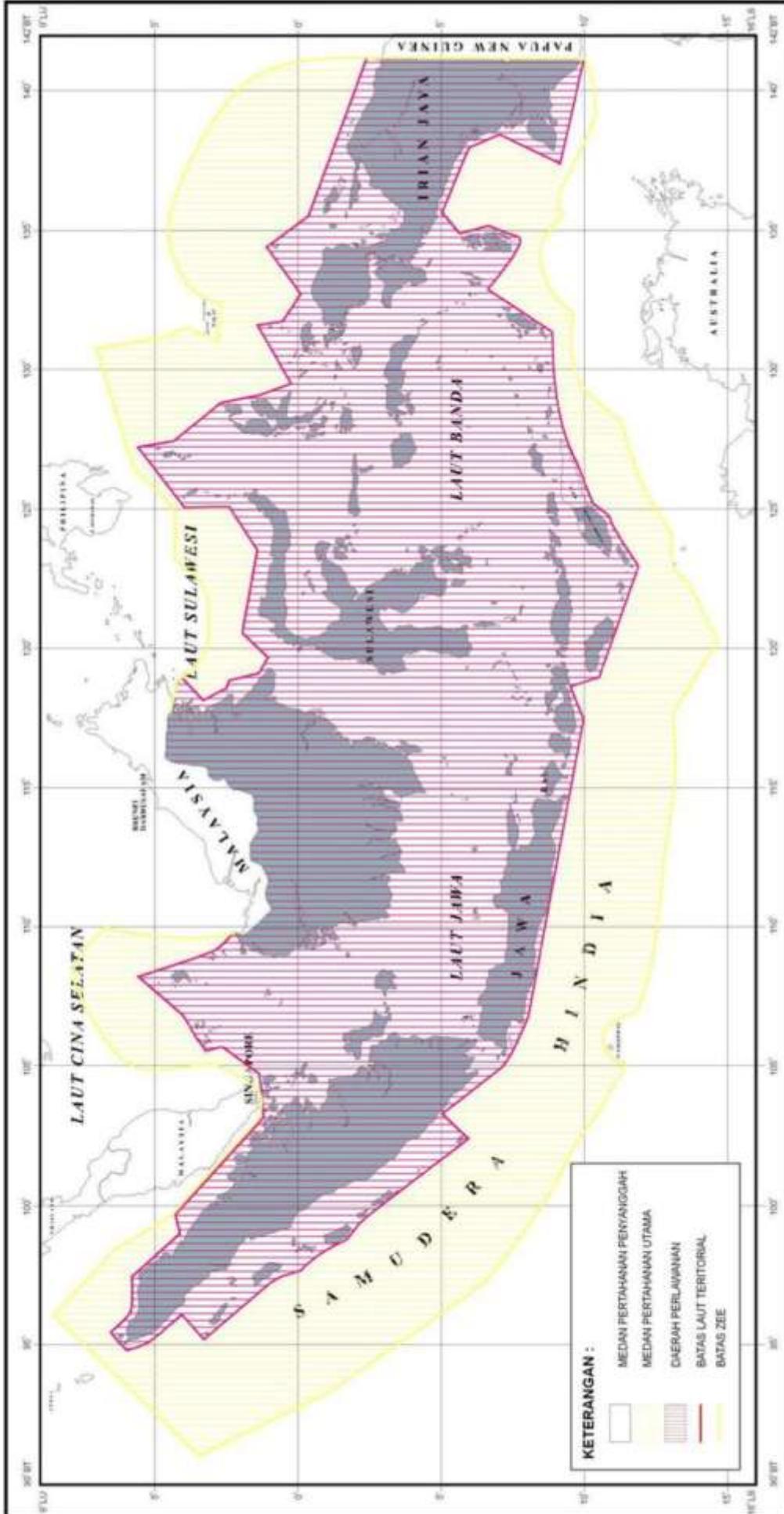
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b. Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas II	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas II	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	0	0	0	0	0	0	1	Balitbang Kemhan, KKP BPPT, ESDM, LPI, Petrokimia	
c. Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas III	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas III	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	0	0	0	0	0	1	Balitbang Kemhan, KKP BPPT, ESDM, LPI, Petrokimia		
e. Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas IV	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	0	0	0	0	0	0	1	Balitbang Kemhan, KKP BPPT, ESDM, LPI, Petrokimia	
f. Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas V	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan bekal kelas I	0	0	0	0	0	0	1	Balitbang Kemhan, KKP BPPT, ESDM, LPI, Petrokimia	
Kajian dan Litbang sumber daya alam dan buatan yang dimiliki strategis, dari aspek ekonomi dan pertahanan.	Tendififikasiasinya sumber daya alam dan buatan yang dimiliki strategis, dari aspek ekonomi dan pertahanan.	Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam dan buatan yang teridentifikasi dimiliki strategis, dari aspek ekonomi dan pertahanan.	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan sumber daya alam dan buatan yang teridentifikasi dimiliki strategis, dari aspek ekonomi dan pertahanan.	0	0	0	0	0	0	1	Balitbang Kemhan, BPPT, ESDM,LPI,
Survey sistem dukungan logistik wilayah yang berkesinambungan untuk kepentingan pertahanan	Terselenggaranya sistem dukungan logistik yang berkesinambungan untuk kepentingan pertahanan	Laporan Hasil Survey keterselenggaraan sistem dukungan yang berkesinambungan untuk kepentingan pertahanan	Laporan Hasil Survey keterselenggaraan sistem dukungan yang berkesinambungan untuk kepentingan pertahanan	0	0	0	0	0	1	1	Kemhan
Menghindari terjadinya kelangkaan logistik bila terjadi keadaan darurat atau keadaan perang	Ketersedian logistik wilayah dalam menghadapi bahan keadaan darurat atau keadaan perang	Ketersedian logistik wilayah dalam menghadapi bahan keadaan darurat atau keadaan perang	Ketersedian logistik wilayah dalam menghadapi bahan keadaan darurat atau keadaan perang	0	0	0	0	0	0	1	
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria SDAB komdik han neg	Tersusunnya norma, standar, prosedur dan kriteria SDAB komdik han neg	Buku Pedoman Tentang Norma, Standart, prosedur dan kriteria SDAB komdik han neg	Jumlah Buku Pedoman tentang Norma, Strandart, Prosedur dan Kriteria SDAB Komdik Han neg	0	1						
Penyusunan Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Material Strategis untuk Komdik Han neg	Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Material Strategis untuk Komdik Han neg Bidang Mineral	Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Material Strategis untuk Komdik Han neg Bidang Mineral	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Material Strategis untuk Komdik Han neg	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)	Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)							
		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)	Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)							
		Menghindari terjadinya kelangkaan logistik bila terjadi keadaan darurat atau keadaan perang	Ketersediaan logistik wilayah dalam menghadapi bahanaya keadaan darurat atau keadaan perang	Ketersediaan logistik wilayah dalam menghadapi bahanaya keadaan darurat atau keadaan perang							
8		Tersusunnya norma, standar, prosedur dan kriteria SDAB komoduk hanneg	Buku Pedoman tentang Norma, Standard, prosedur dan kriteria SDAB komoduk hanneg	Jumlah Buku Pedoman tentang Norma, Standard, prosedur dan kriteria SDAB komoduk hanneg							
9		Penyusunan Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg	Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Mineral	Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Mineral	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Mineral						
		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg	Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)							
		Tersusunnya Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)	Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)	Jumlah Buku Pedoman tentang Pola Penataan dan Pembinaan Cadangan Materil Strategis untuk Komoduk Hanneg Bidang Minyak dan Gas (Mgas)							
10		Revisi Buku Pedoman Pendataan Komoduk Hanneg	Tersusunnya Buku Pedoman Pendataan Komoduk Hanneg	Jumlah Revisi Buku Pedoman Pendataan Komoduk Hanneg							
11		Kajian tentang Penataan SDAB sebagai Logwil untuk Komoduk Hanneg	Laporan Hasil Kajian tentang Penataan SDAB sebagai Logwil untuk Komoduk Hanneg di wilayah Prov. Kalbar dan Kaltara	Jumlah Laporan Hasil Kajian tentang Penataan SDAB sebagai Logwil untuk Komoduk Hanneg di wilayah Prov. Kalbar dan Kaltara							

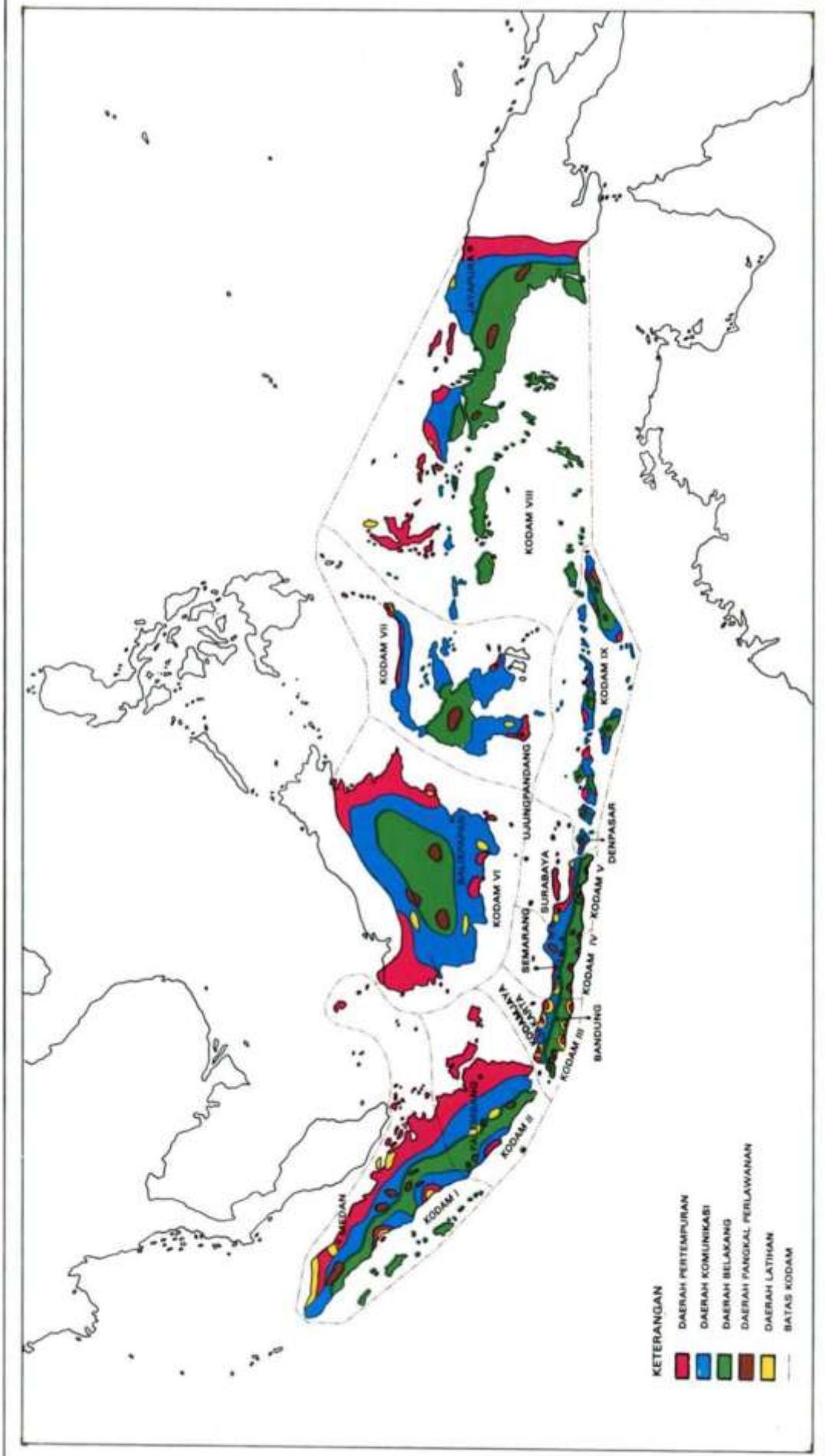
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg	Tersusunnya Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Sumbar, Sulbar, Sulteng, Sultra, Maluku Utara dan Papua.	Laporan Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Sumbar, Sulbar, Sulteng, Sultra, Maluku Utara dan Papua.	Jumlah Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Sumbar, Sulbar, Sulteng, Sultra, Maluku Utara dan Papua.	0	1					
		Tersusunnya Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Jalm., Subar, Sulteng, Sultra, Maluku Utara dan Papua.	Laporan Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Jalm., Subar, Sulteng, Sultra, Maluku Utara dan Papua.	Jumlah Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Jalm., Subar, Sulteng, Sultra, Maluku Utara dan Papua.	0	0	1				
		Tersusunnya Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Jalm., Sumsel, Sulsel, Sulsel, Kalbar	Laporan Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Jalm., Sumsel, Sulsel, Sulsel, Kalbar	Jumlah Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Jalm., Sumsel, Sulsel, Sulsel, Kalbar	0	0	0	1			
		Tersusunnya Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Kopr. Kalang, Gorontalo, Maluku, NTT dan NTB	Laporan Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Kopr. Kalang, Gorontalo, Maluku, NTT dan NTB	Jumlah Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Kopr. Kalang, Gorontalo, Maluku, NTT dan NTB	0	0	0	1			
		Tersusunnya Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Papua Barat, Riau, Lampung, Bengkulu, Jateng dan Jabar	Laporan Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Papua Barat, Riau, Lampung, Bengkulu, Jateng dan Jabar	Jumlah Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg di wilayah Prov. Papua Barat, Riau, Lampung, Bengkulu, Jateng dan Jabar	0	0	0	0	1		
		Tersusunnya Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg	Laporan Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg	Jumlah Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg	0	0	0	1			
		Tersusunnya Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg	Laporan Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg	Jumlah Hasil Pemutakhiran Data SDAB Komodik Hanneg	0	0	0	0	1		
		Tersusunnya Peta Strategik Potensi SDAB Komodik Hanneg	Laporan Hasil Peta Strategik Potensi SDAB Komodik Hanneg	Jumlah Hasil Peta Strategik Potensi SDAB Komodik Hanneg	0	0	0	0	0	1	
13	Pembentukan Peta Strategik Potensi SDAB Komodik Hanneg	Tersusunnya Peta Strategik Potensi SDAB Komodik Hanneg	Laporan Hasil Peta Strategik Potensi SDAB Komodik Hanneg	Jumlah Hasil Peta Strategik Potensi SDAB Komodik Hanneg	0	1	1	1	1	1	
	C	Pemberdayaan									Kemhan
	1	Menyusun Pemberdayaan tentang Penataan SDAB yang dapat diwujudkan menjadi Logwil dan Cadmistrat	Tersusunnya Kurikulum Pemberdayaan tentang Penataan SDAB yang dapat diwujudkan menjadi Logwil dan Cadmistrat	Kurikulum Pemberdayaan tentang Penataan SDAB yang dapat diwujudkan menjadi Logwil dan Cadmistrat yang dapat diterapkan							
	3	Program Pemberdayaan masyarakat tentang Penataan SDAB yang dapat diwujudkan menjadi Logwil dan Cadmistrat	Jumlah Kader Pemberdayaan masyarakat tentang Penataan SDAB yang dapat diwujudkan menjadi Logwil dan Cadmistrat	Jumlah Kader Pemberdayaan masyarakat tentang Penataan SDAB yang dapat diwujudkan menjadi Logwil dan Cadmistrat							
					3250	3250					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi Penataan SDA dan SDB sebagai logistik wilayah Komoduk Hanneg	Kommunitas Pengelola SDA dan SDB dalam rangka pembinaan potensi SDAB di Prov. Sulbar, Sulsel, Kalim, Riau & Jambi	Jumlah Komunitas Pengelola SDA dan SDAB dalam rangka pembinaan potensi SDAB di Prov. Sulbar, Sulsel, Kalim, Riau & Jambi	Jumlah Komunitas Pengelola SDA dan SDAB dalam rangka pembinaan potensi SDAB di Prov. Sulbar, Sulsel, Kalim, Riau & Jambi							
2	Sosialisasi Rancangan Induk SDAB Komoduk Hanneg	Kommunitas Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan potensi SDAB di wilayah NKRI	Jumlah Komunitas SDAB dalam rangka pembinaan potensi SDAB di wilayah NKRI	Jumlah Komunitas SDAB dalam rangka pembinaan potensi SDAB di wilayah NKRI							
3	Supervisi										
4	Menyusun pedoman Supervisi penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan terhadap penyelenggara komando kewilayahan dalam rangka penyuplai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis	Terwujudnya buku pedoman Supervisi penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan terhadap penyelenggara komando kewilayahan dalam rangka penyuplai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis	Jumlah buku pedoman supervisi penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan	Jumlah buku pedoman supervisi penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan							
5											
6	Supervisi penataan dan pembinaan sumber daya alam dan buatan terhadap penyelenggara komando kewilayahan dalam rangka penyuplai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis	Peningkatan pemahaman apparatur penyelenggara komando kewilayahan dalam rangka penyuplai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis	Jumlah apparatur penyelenggara komando kewilayahan yang akan diberikan supervisi dalam rangka penyuplai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis	Jumlah apparatur penyelenggara komando kewilayahan yang akan diberikan supervisi dalam rangka penyuplai logistik wilayah dan cadangan materiil strategis							
7											
8											
9											

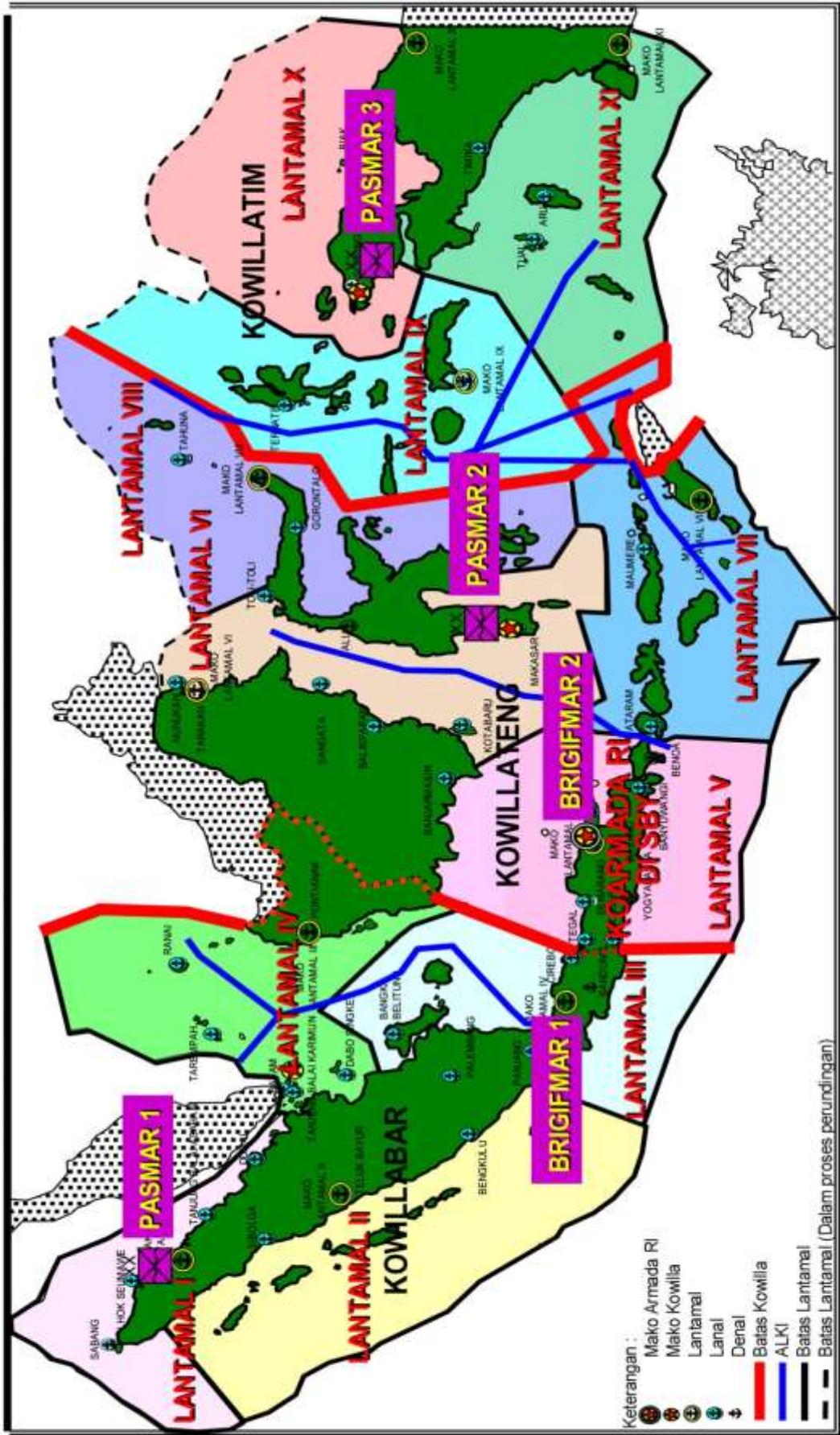
KAWASAN PERTAHANAN NUSANTARA



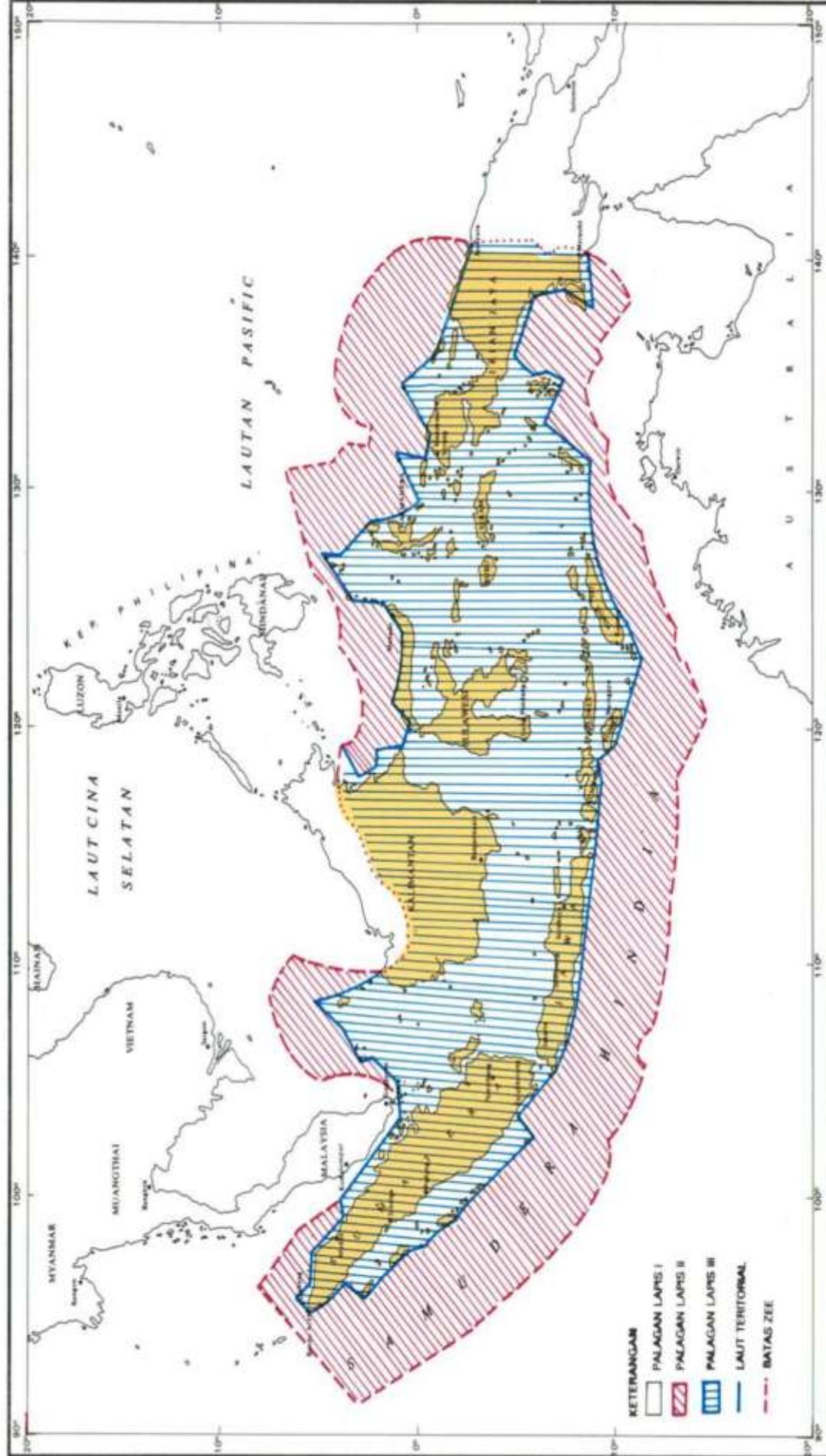
KOMPARTEMEN STRATEGI WILAYAH DARAT



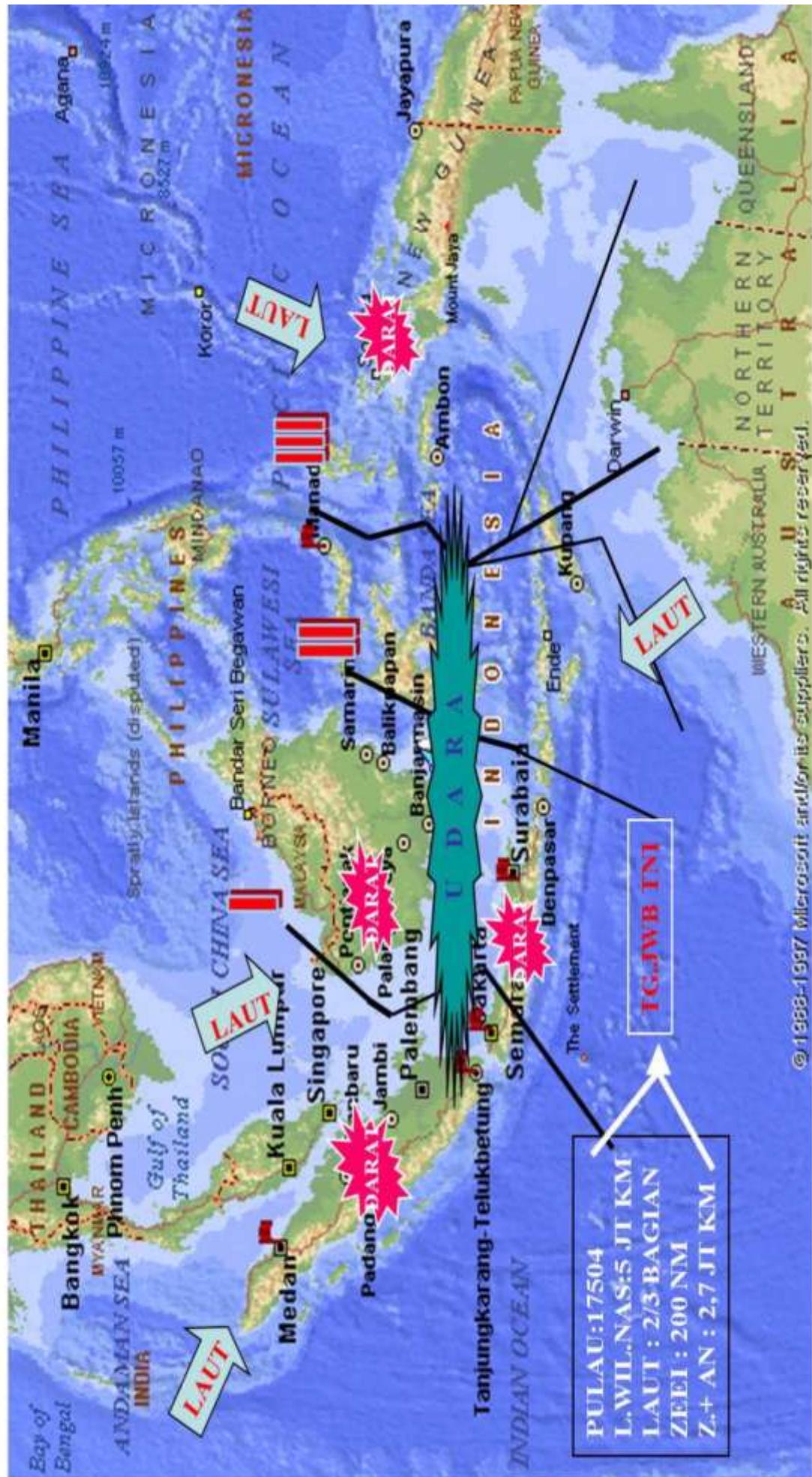
RENCANA PENGGELARAN PANGKALAN DAN KEKUATAN MARINIR



PALAGAN PELIBATAN KEKUATAN UDARA

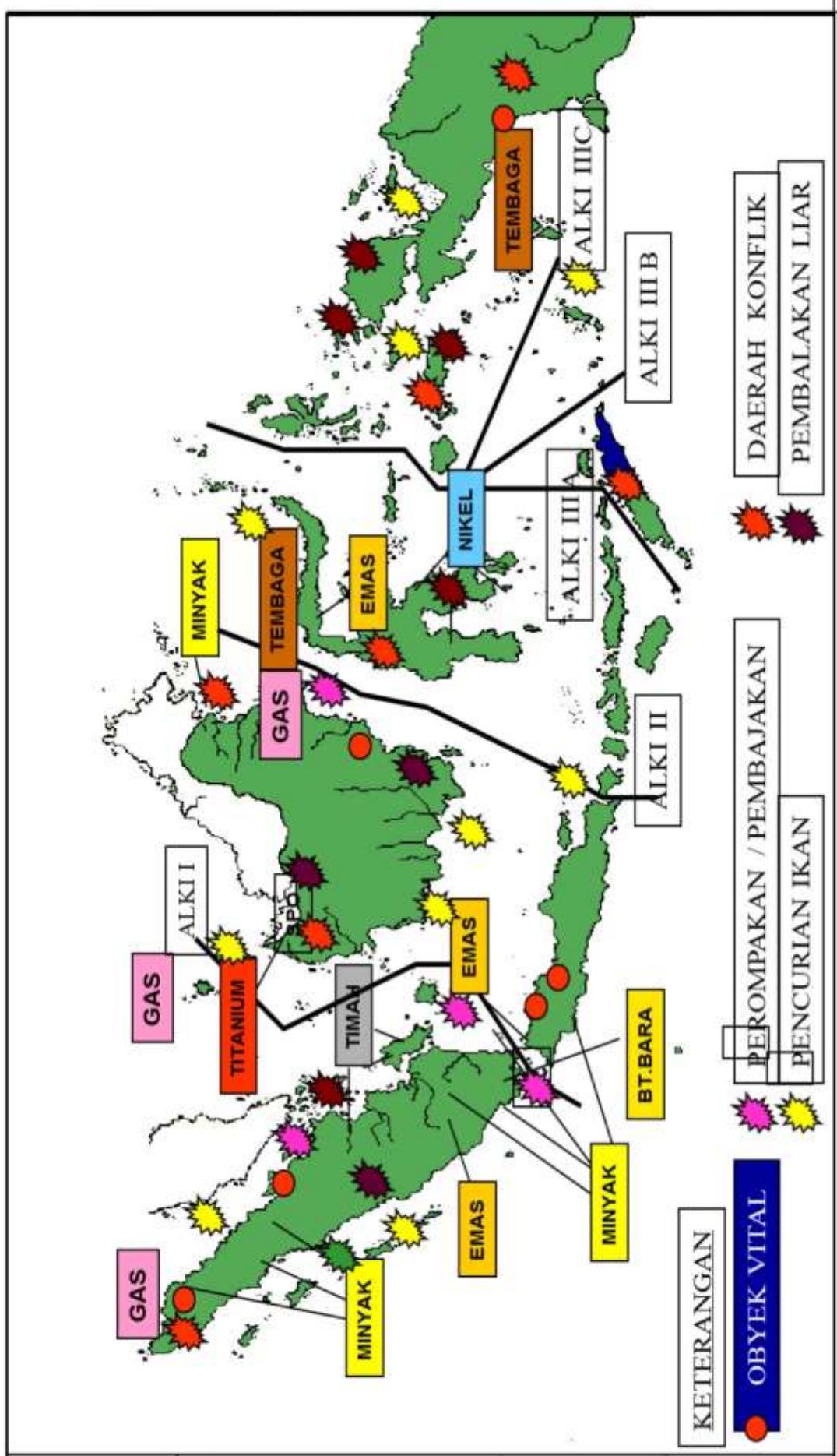


RENCANA PELIBATAN (DARAT - LAUT - UDARA)

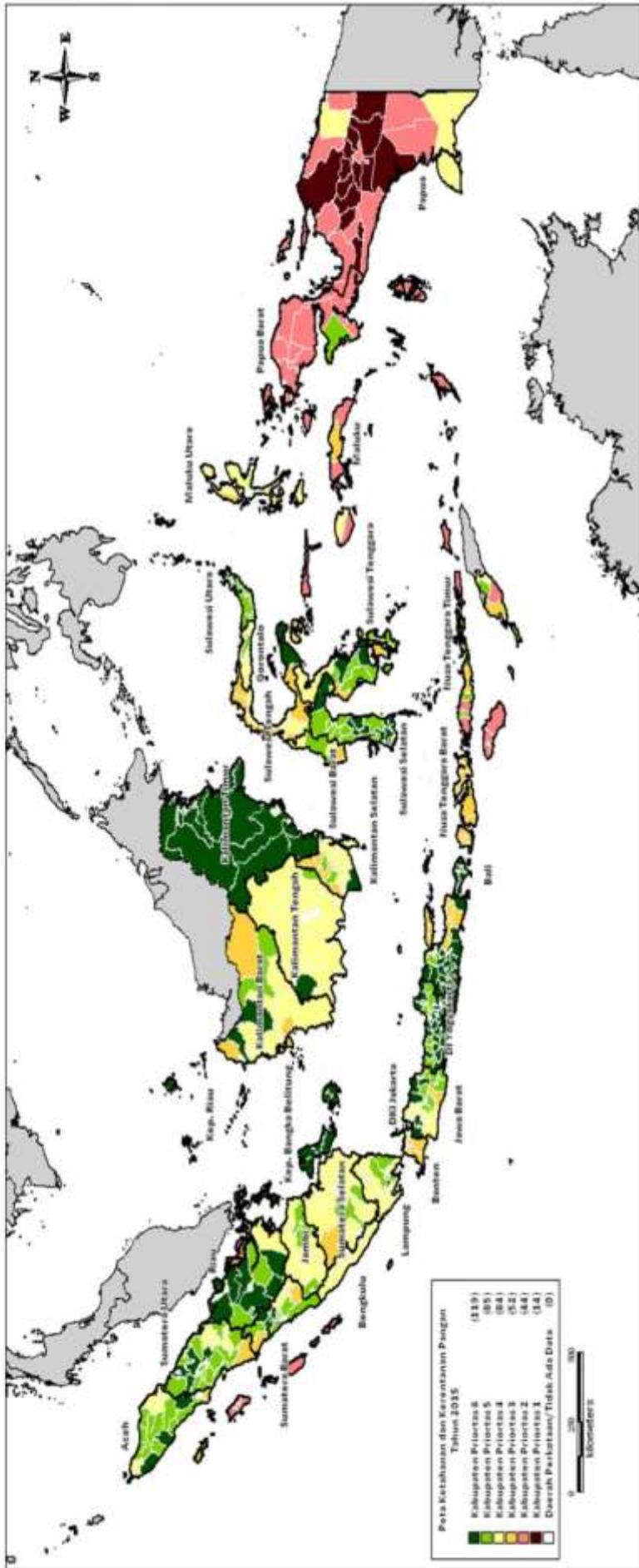


PETA SDA, OBYEK VITAL, ALKI , DAERAH RAWAN

5



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 2015

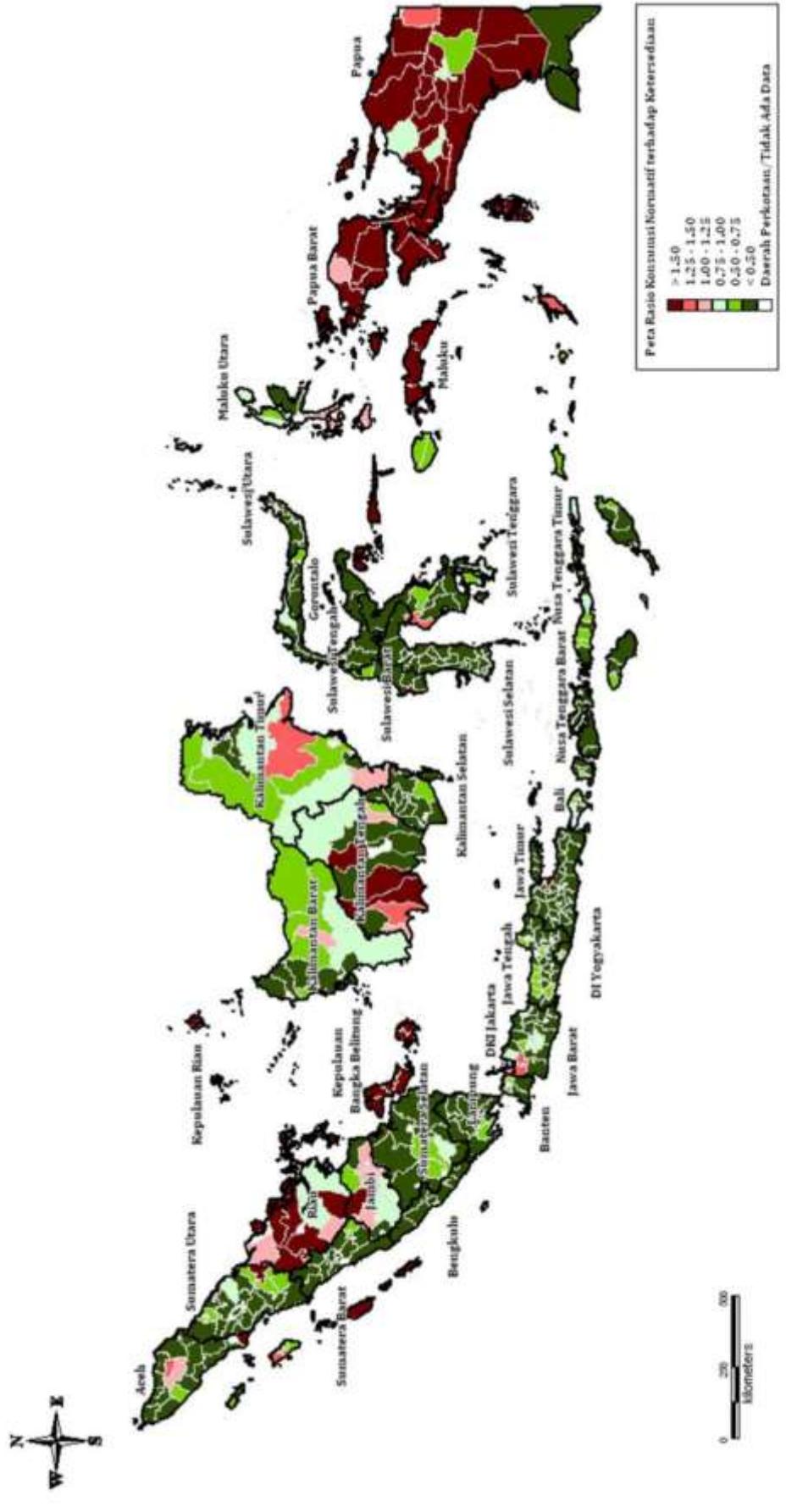


Penjelasan:

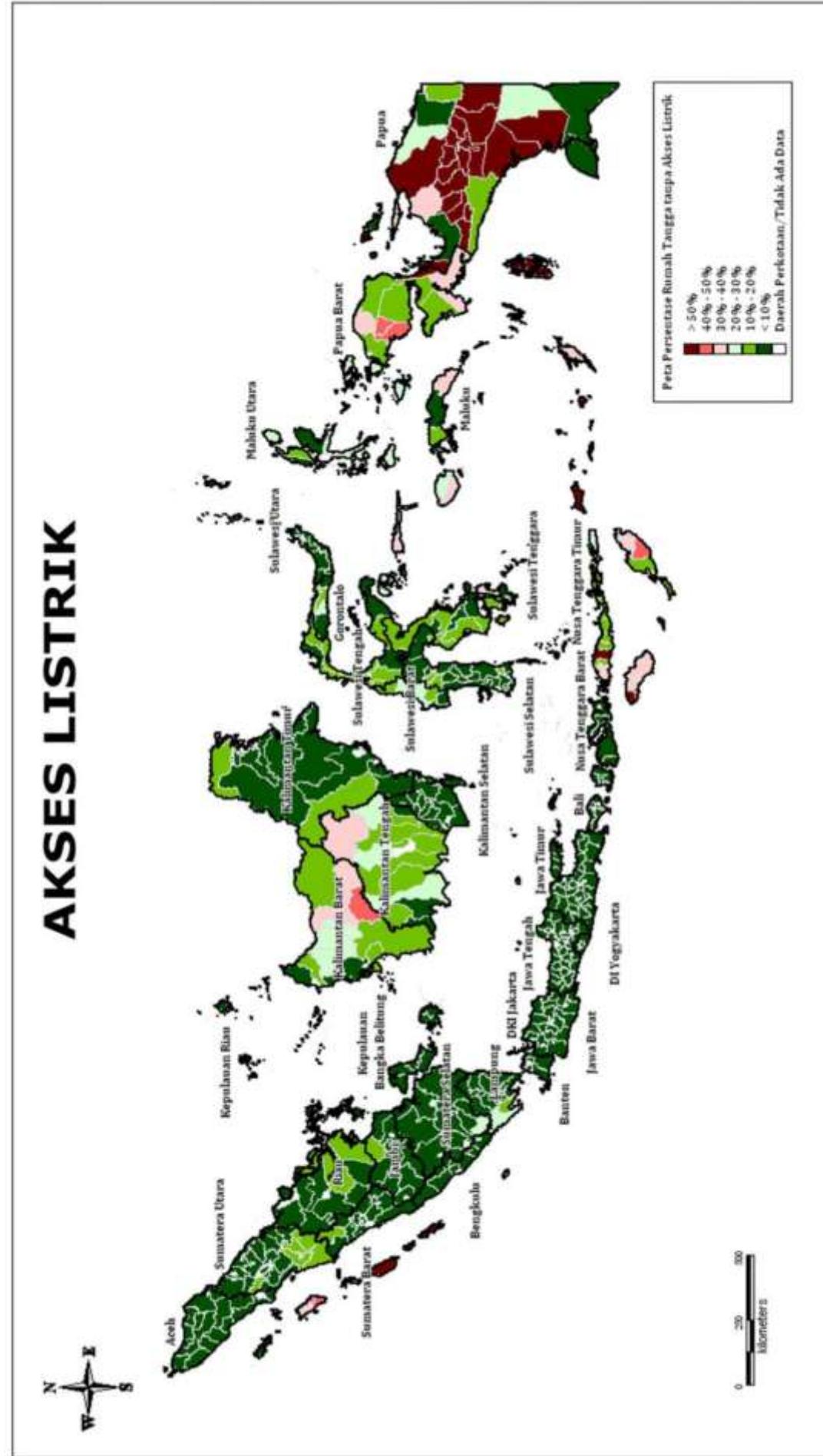
1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA menggambarkan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan pada tingkat wilayah kabupaten.
2. Analisis FSVA 2015 mencakup 398 kabupaten diseluruh Indonesia, wilayah perkotaan tidak diikutsertakan dalam analisis ini.
3. Kabupaten yang termasuk Prioritas 1 (warna hijau tua), merupakan wilayah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan, sebaliknya kabupaten yang termasuk Prioritas 6 (warna merah tua) merupakan wilaya yang paling tahan.

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, September 2016

Peta Ketersediaan Pangan



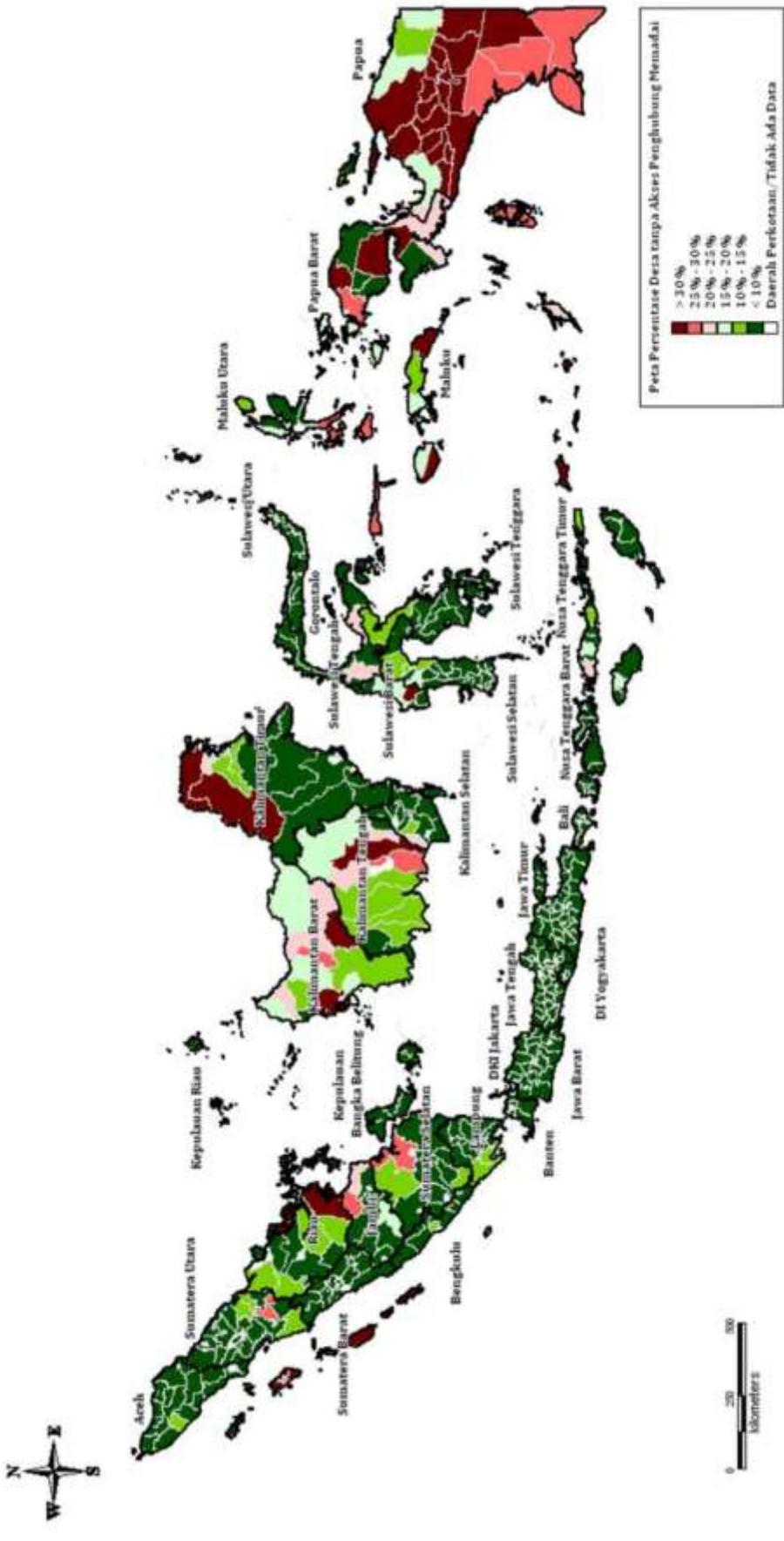
AKSES LISTRIK



Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Dan Buatan
Komponen Pendukung Pertahanan Negara

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, September 2016

AKSES JALAN

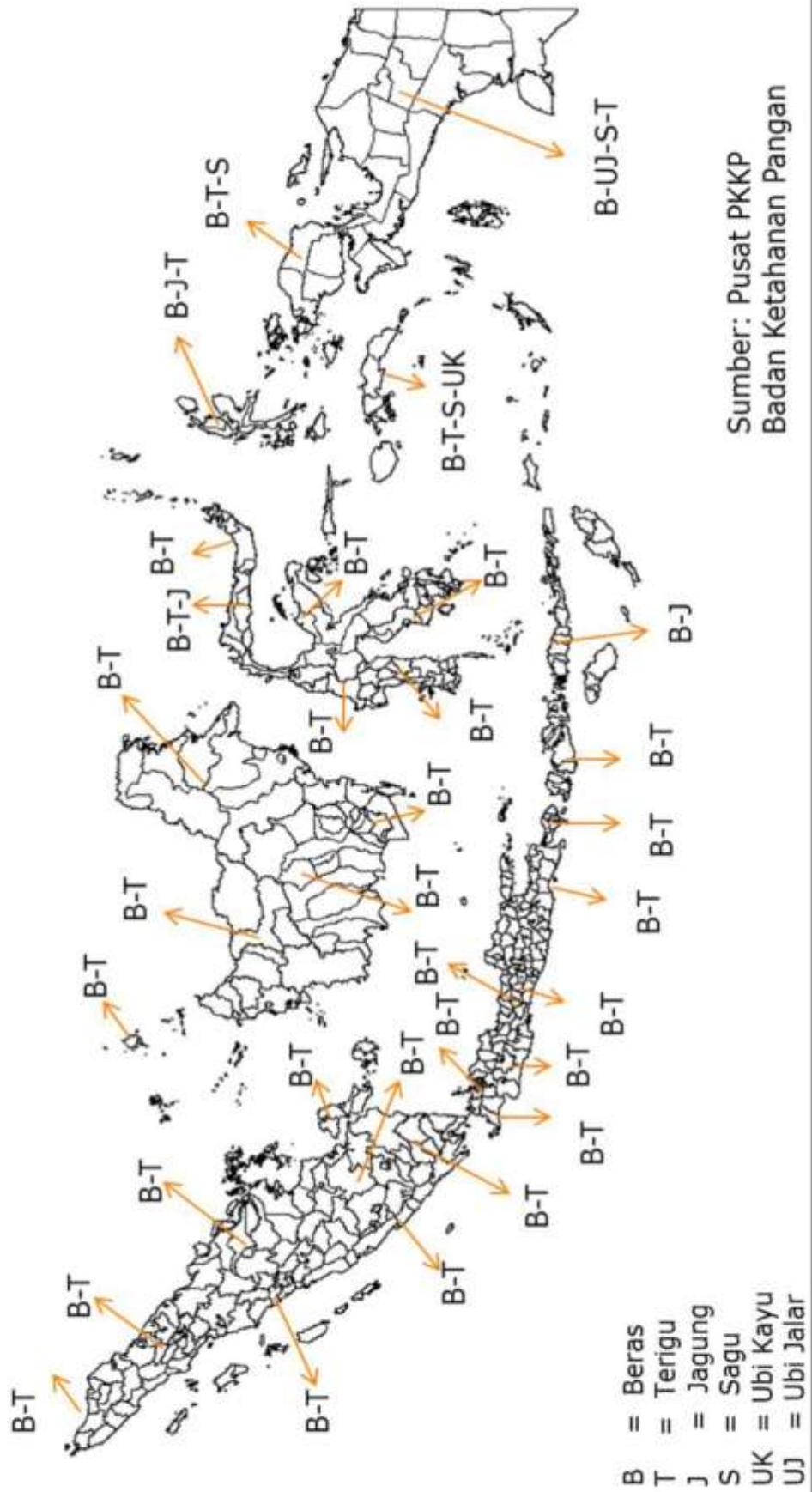


Rancangan Induk Penataan Sumber Daya Alam Dan Buatan
Komponen Pendukung Pertahanan Negara

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, September 2016

POTENSI SUMBERDAYA PANGAN (SDP) NASIONAL:

PETA KONSUMSI KARBOHIDRAT



Sumber: Pusat PKKP
Badan Ketahanan Pangan

SUMBERDAYA PANGAN (Sumber Karbohidrat) INDONESIA



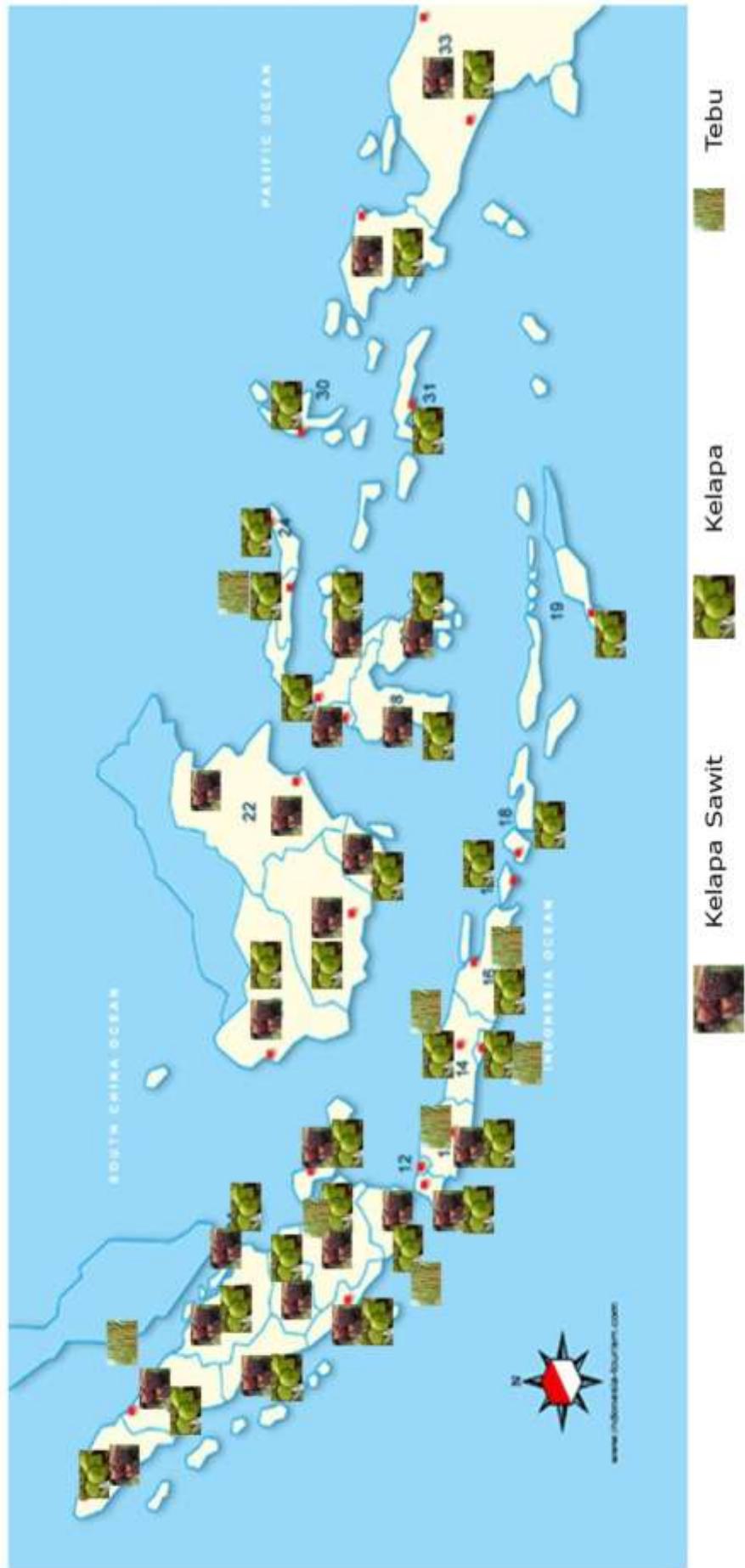
Sumber : Badan Ketahanan Pangan, September 2016

SUMBERDAYA PETERNAKAN INDONESIA



Sumber : Badan Ketahanan Pangan, September 2016

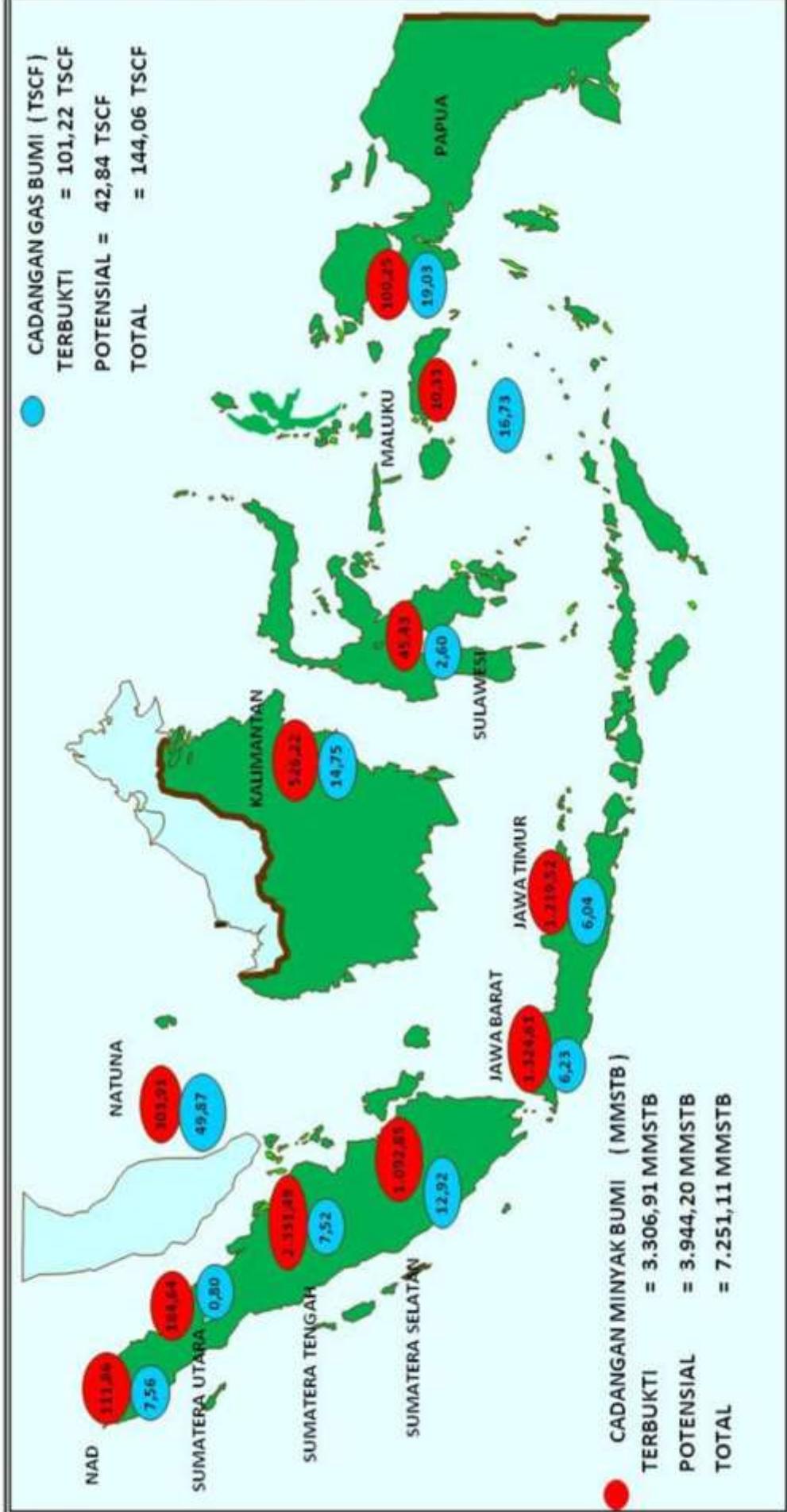
KOMODITAS PERKEBUNAN INDONESIA



Sumber : Badan Ketahanan Pangan, September 2016

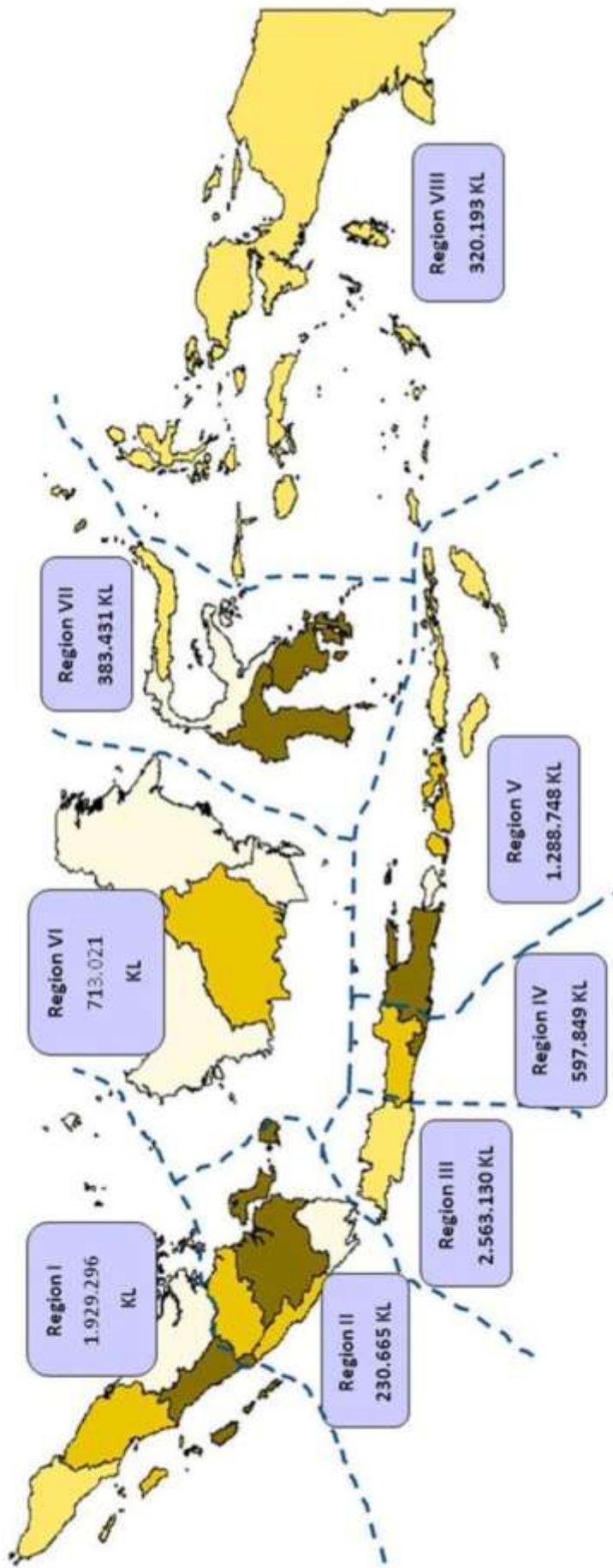
CADANGAN SERTA PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI INDONESIA

Status 1 JANUARI 2015



Sumber : Ditjen Migas Kem. ESDM, Nopember 2016

REGIONALISASI FASILITAS PENYIMPANAN BBM

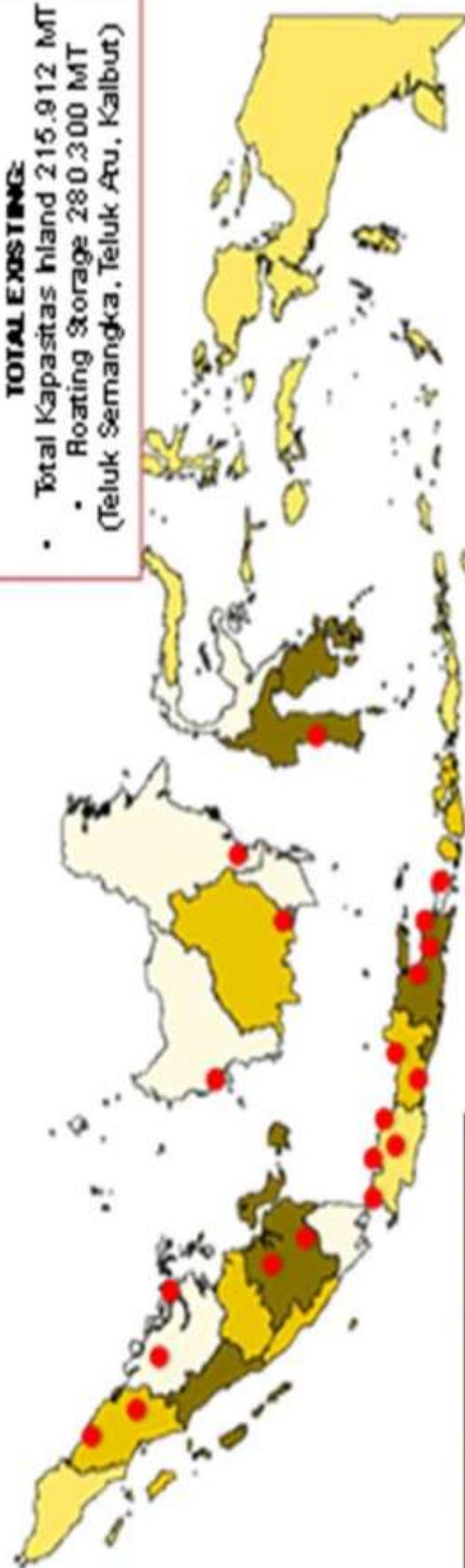


Milik Petmanina, BU Penyimpanan BBM dan BU
Niaga Umum BBM:

8.027.333 KL

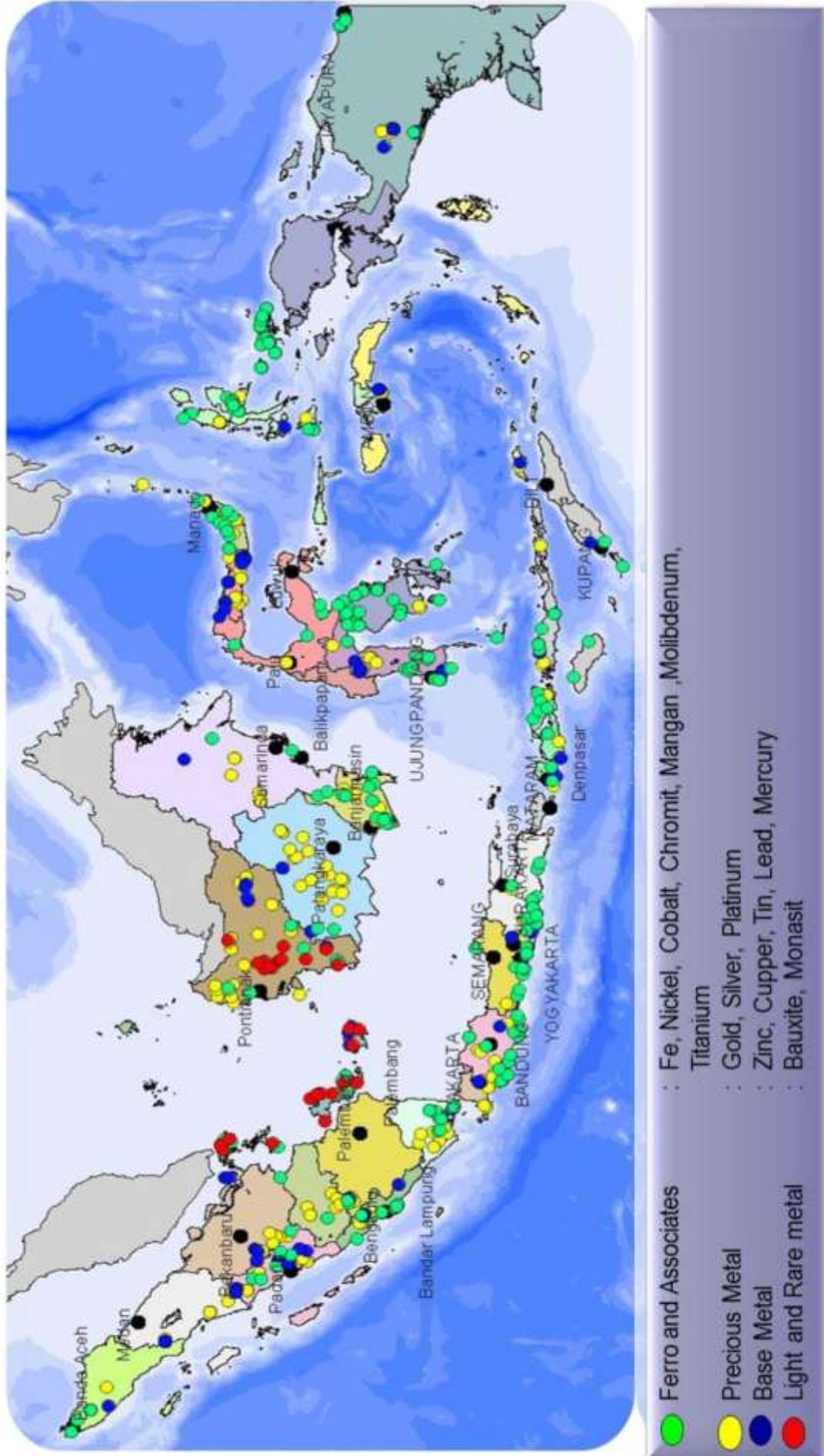
Sumber : Ditjen Migas Kem. ESDM, Nopember 2016

FASILITAS PENYIMPANAN DEPO LPG (INLAND)

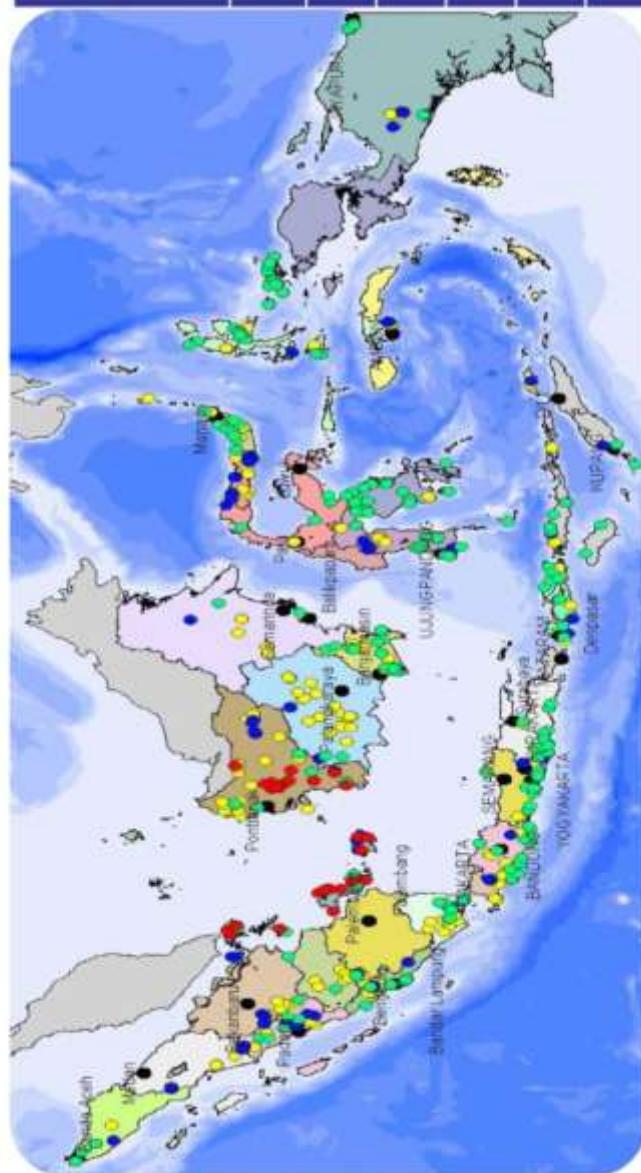


No	Fasilitas Penyimpanan	Kapasitas QTD	No	Fasilitas Penyimpanan	Kapasitas QTD	No	Fasilitas Penyimpanan	Kapasitas QTD
1	Tanjung	350	8	Beton	10.000	15	Tl. Perak	8.000
2	Pantai dan Guruh	6.000	9	Cilacap	3.000	16	Tl. Uban (Pengeluaran)	89.202
3	Depoldam	1.800	10	Gemarau	10.000	17	Tl. Uban (Penerimaan)	8.475
4	P. Lau/ang	1.255	11	Gresik	10.000	18	Ponoran	1.500
5	Lampung/Pariang	5.000	12	Tembaga Merah II	3.000	19	Matahar	1.500
6	Tanjung Sebang	10.000	13	Tl. Pidie	19.000	20	Batubara	12.500
7	Bogoraja	3.000	14	Serangkut	10.000			2.000

SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL



SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL



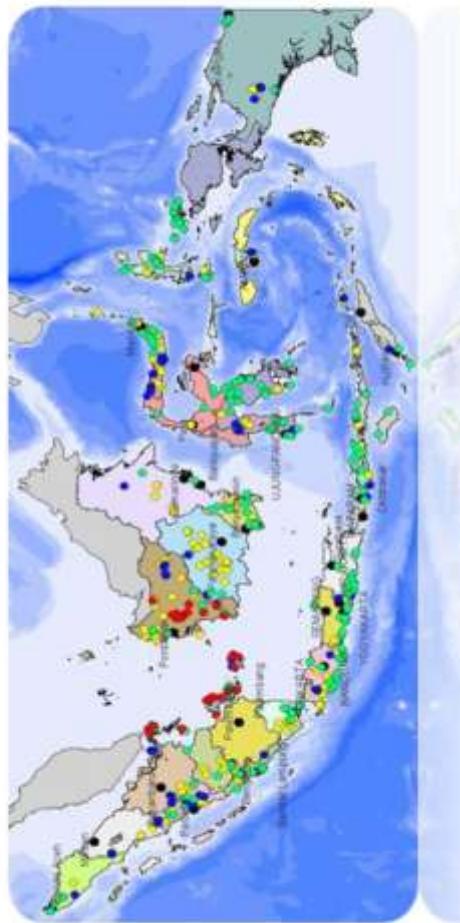
- Ferro and Associates : Fe, Nickel, Cobalt, Chromit, Mangan, Molibdenum, Titanium
- Precious Metal : Gold, Silver, Platinum
- Base Metal : Zinc, Copper, Tin, Lead, Mercury
- Light and Rare metal : Bauxite, Monasit

- Potensi mineral tersebut namun dengan jumlah yang terbatas
- Perlu strategi peningkatan nilai tambah

NO	Komoditas	Sumberdaya (Juta Ton)		Cadangan (Juta Ton)	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Tembaga	18.284	108,7	2.719	25
2	Nikel	3.711	54,4	1.155	21
3	Perak	14.468	0,8	15.11	1.949
4	Bauksit	1.347	648,5	585	239
5	Bijih Besi	712	401,8	65,5	39,8
6	Pasir Besi	2.121	443,7	173,8	25,4
7	Mangan	15	6,3	4,4	2,8
8	Seng	670	7,5	19,8	2,2
9	Timah	3.945	2,3	1.322	0,284
10	Emas Primer	8.357	0,007	2.807	0,0025

Sumber: Renstra KESDM 2015-2019

KONDISI SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL LOGAM INDONESIA



Ferro and Associates: Fe, Nickel, Cobalt, Chromit, Mangan, Molibdenum,
Titanium
Precious Metal : Gold, Silver, Platinum
Base Metal : Zinc, Copper, Tin, Lead, Mercury
Light and Rare metal : Bauxite, Monasit

Sumber :
Badan Geologi, KESDM, Desember 2015

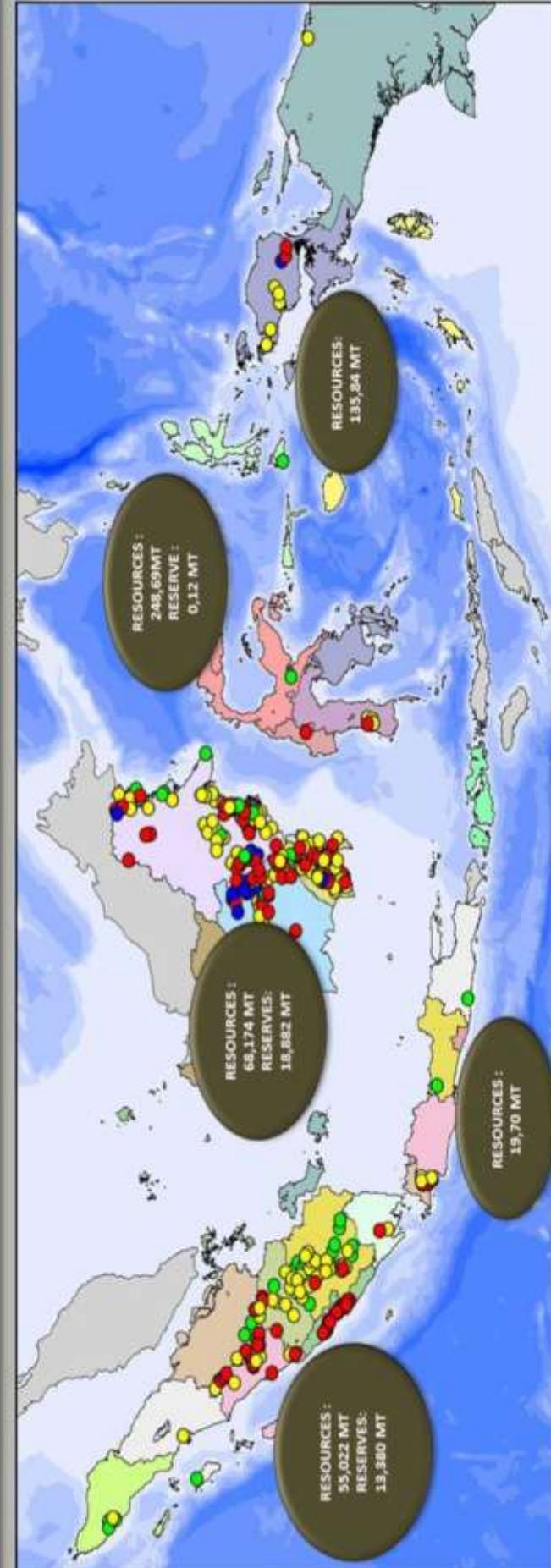
NO	KOMODITI	TOTAL SUMBER DAYA (TON)		TOTAL CADANGAN (TON)	
		BUJIH	LOGAM	BUJIH	LOGAM
1	Emas Primer	8.703.669.136		6.613	2.832.377.068
2	Bauksit	3.617.770.882		1.740.461.414	1.257.169.367
3	Nikel	5.756.362.683		79.172.702	3.197.178.940
4	Tembaga	29.753.119.232		149.678.344	5.485.960.754
5	Besi	1.397.068.930		418.888.703	279.354.825
6	Pasir Besi	4.459.586.351		1.683.084.164	808.938.227
7	Mangan	60.893.820		27.977.709	87.236.536
8	Seng	670.658.336		7.487.776	19.864.091
9	Timah	3.924.474.108		2.464.171	1.592.208.743
10	Xenotim	6.466.257.914		20.734	
11	Perak	14.469.988.181		838.765	3.056.379.162
					1.691.957

KONDISI SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL STRATEGIS INDONESIA

NO	KOMODITI	TOTAL SUMBER DAYA (TON)		TOTAL CADANGAN (TON)	
		BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM
1	Primary Chromite	1.642.925	756.931	0	0
2	Placer Chromite	5.782.929	2.442.554	4.078.029	2.834.916
3	Mangan	60.893.820	27.977.709	87.236.536	43.134.791
4	Molibdenum	1.211.000.005	300.449	0	0
5	Nikel	5.756.362.683	79.172.702	3.197.178.940	50.872.304
6	Lateritic Titanium	741.298.559	2.985.335	0	0
7	Placer Titanium	71.449.130	7.205.671	1.480.000	118.306
8	Cobalt	1.481.642.000	1.630.161	490.336.020	471.693
9	Logam Tanah Jarang :				
	a. Monasit	1.569.312.847	25.920	0	2.715
	b. Xenotim	6.466.257.914	20.734	0	0

Sumber :
Badan Geologi, KESDM

SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA



Kualitas	Hipotesis	Sumberdaya (Batu Bara)			Kandungan (Batu Bara Ton)	Total
		Tekra	Terminjuk	Tersisa		
Kalori Sangat Tinggi	1.878.33	8.650.04	10.432.35	12.258.65	34.339.67	27.11
Kalori Tinggi	16.882.22	22.413.43	17.441.12	24.286.95	81.033.10	63.89
Kalori Sedang	889.19	2.024.47	2.186.22	3.248.11	8.122.99	7.21
Kalori Rendah	12.61	1276.40	394.02	453.49	2.143.58	1.69
Total	19.703.84	26.348.39	30.653.51	40.247.60	136.608.34	100.00

- Perlu adanya eksplorasi yang lebih intensif.
- Peningkatan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik terutama sebagai sumber energi (listrik).

KONDISI SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA INDONESIA

Kualitas	Sumberdaya (Juta Ton)			Jumlah	Cadangan (Juta Ton)		Total
	Tereka	Tertunjur	Terukur		%	Terkira	
Kalori Rendah	9.650,04	10.432,15	12.258,65	32.340,84	30,27	6.203,69	3.271,78
Kalori Sedang	22.413,42	17.441,12	24.286,35	64.140,89	60,03	16.485,65	3.858,21
Kalori Tinggi	2.804,47	2.186,22	3.243,11	8.233,80	7,71	545,20	974,33
Kalori Sangat Tinggi	1.276,46	394,02	459,49	2.129,97	1,99	761,51	163,31
TOTAL	36.144,39	30.453,51	40.247,60	106.845,50	100,00	23.996,05	8.267,63
							32.263,68

Sumber: Badan Geologi KESDM, Desember 2015

Catatan :

Kualitas berdasarkan kelas nilai kalori

(Keppres No. 13 Tahun 2000 diperbaharui dengan PP No. 45 Tahun 2003)

a. Kalori Rendah < 5100 kal/gr

b. Kalori Sedang 5100 - 6100 kal/gr

c. Kalori Tinggi > 6100 - 7100 kal/gr

d. Kalori sangat Tinggi > 7100 kal/gr

**Kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku
Katakan padanya padi - padi telah kembang
Ani - ani seluas padang roda giling berputar - putar
Siang malam tapi bukan kami punya**

**Kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku
Katakan padanya tebu-tebu telah kembang
Putih-putih seluas padang
Roda lori berputar – putar siang malam
Tapi bukan kami punya**

**Anak-anak kini telah pandai menyanyikan gema merdeka
Nyanyi - nyanyi bersama-sama di tanah-tanah gunung
Anak-anak kini telah pandai menyanyikan gema merdeka
Nyanyi - nyanyi bersama-sama tapi bukan kami punya**

**Tanah pusaka tanah yang kaya
Tumpah darahku di sana kuperdiri
Di sana kumengabdi dan mati dalam cinta yang suci**

**Kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku
Katakan padanya nasi tumbuk telah masak
Kan kutunggu sepanjang hari
Kita makan bersama-sama berbincang-bincang
Di gubuk sudut dari desa**